

332.1
ARS
2 c1

**ANALISIS PROBABILITAS KEBANGKRUTAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BERMASALAH
STRUKTURAL DI WILAYAH KERJA KANTOR
BANK INDONESIA SEMARANG
TAHUN 1998 SD. 2000**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
derajat Sarjana – S2 Magister Manajemen
Program Studi Magister Manajemen
Universitas Diponegoro**



**Oleh
Arsena
NIM C4A099266**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2001**



Sertifikat

Saya, Arsena, yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister manajemen ini ataupun pada program lain.

Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pundak saya.

Arsena

20 November 2001

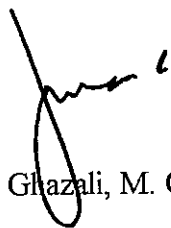
PENGESAHAN TESIS

Yang bertandatangan tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:

ANALISIS PROBABILITAS KEBANGKRUTAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BERMASALAH STRUKTURAL DI WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA SEMARANG TAHUN 1998 SD.2000

Yang disusun oleh Arsena NIM C4A099266 telah dipertahankan di depan
Dewan penguji pada tanggal 20 November 2001 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Imam Ghazali, M. Com, Akt

Pembimbing Anggota



Drs. Basuki HP, MBA, Macc, Akt

Semarang, 20 November 2001

UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM



Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT dan berkat rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar jenjang pendidikan derajat sarjana S2 Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu selesainya karya tulis ini kepada:

1. Dr Imam Chozali, M.Com, Akt selaku Pembimbing Utama.
2. Drs.Basuki HP. MBA, Macc, Akt selaku Anggota Pembimbing
3. Prof. Dr. Suyudi Mangunwiharjo, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
4. Segenap Dosen Pengajar serta Karyawan Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoror, Semarang.
5. Direktur dan Pimpinan Bank IndonesiaSemarang yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
6. Seluruh keluarga dan rekan sejawat yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil atas keberhasilan penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata, kami berharap agar Tesis ini dapat bermamfaat bagi penelitian dan pengembangan perbankan dimasa mendatang.

Semarang, Oktober 2001

Penyusun



Arsena

4A 099266

ABSTRACT

The purpose of this research is to give a clear explanation about bank (Bank Perkreditan Rakyat) condition for bank supervisors in their duty. The model used in this research should quantitatively figure the performances of rural banks (BPR) that have structural problem and predict whether a certain rural bank still has possibility to survive or not in the future.

Using 53 structural problem BPRs in KBI Semarang (Bank Indonesia Office in Semarang), this research is hopefully representing all of structural problem of BPR in Middle Java Province. In this research, deeply evaluation has been done to determine significance variable within 1 and 2 years observation before certain banks get bankrupt.

Data and hypothesis test result using Logistic Regression Linear Model, explain the probabilities of getting bankruptcy of a certain structural problem BPR with financial ratio CAMEL proxy, BPRs' characteristics, and local economics conditions.

The research concludes that the observation result and the variable statistic test with CAMEL proxy are significantly related to the bankruptcy of a certain BPR. The other test with other variables is not significantly in predicting bankruptcy.

ABTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk dengan tujuan memberikan gambaran secara riil bagi pengambil putusan utamanya dalam pengawasan bank di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Model yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan akan mampu menjawab secara kuantitatif kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bermasalah structural, termasuk meramal kapan BPR tersebut bangkrut atau masih mempunyai potensi tumbuh.

Dengan menggunakan sample 53 BPR bermasalah structural yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Semarang, hasil penelitian ini diharapkan mampu mewakili apa yang terjadi pada BPR bermasalah structural di Jawa Tengah pada umumnya. Dalam penelitian ini dikaji lebih mendalam mengenai variable apa yang sangat berpengaruh dan mempunyai signifikansi dalam pengamatan 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sebelum bangkrut.

Hasil pengujian data dan hipotesa dengan menggunakan *Logistic Regression Linier Model* yang akan menghasilkan probabilitas atau kemungkinan bangkrutnya suatu BPR bermasalah structural dari rasio keuangan melalui proxy CAMEL, Karakteristik BPR tersebut dan Kondisi Ekonomi Lokal.

Dari kesimpulan penelitian menunjukkan hasil pengamatan dan uji statistik variable yang mempunyai hubungan signifikan dengan kebangkrutan BPR bermasalah adalah Proxy CAMEL, sedangkan variable lainnya tidak.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Abstract	iii
Abtraksi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Manfaat Penelitian	12
 BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1. Telaah Pustaka	13
2.1.1. Konsep Dasar	13
2.1.2. CAMEL	16

	2.1.3	Pengertian Kebangkrutan	17
	2.2.	Penelitian Terdahulu	19
	2.3.	Kerangka Pemikiran Teoritis	25
	2.3.1.	Gambar Model	26
	2.4.	Hipotesis	27
BAB III		METODE PENELITIAN	29
	3.1.	Jenis, Sumber dan Sampel Data	29
	3.2.	Model Analisis	30
	3.3.	Difinisi Operasionil	32
	3.3.1.	Variabel <i>Proxy</i> CAMEL	32
	3.3.2.	Variabel Karakteristik	33
	3.3.3.	Variabel Ekonomi Lokal	33
	3.4.	Tehnik Pengujian	34
BAB IV		GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	4.1.	Sejarah Singkat Perkembangan BPR	35
	4.2.	Gambaran Umum BPR di Wilayah Kerja Bank Indonesia Semarang	37
	4.3.	Gambaran Umum Kegiatan Usaha BPR Sampel	40
	4.3.1.	Perkembangan Usaha BPR	40
	4.3.2.	Penyebaran dan Perkembangan BPR	47

	4.3.3. Bentuk dan Status Kepemilikan BPR	49
	4.3.4. Kegiatan Operasional BPR	49
	4.4. Gambaran Umum BPR Bermasalah Struktural	52
BAB V	ANALISA DATA	56
	5.1. Informasi Data	56
	5.2. Hasil Persamaan Regresi Logistik	59
	5.3. Uji Validasi	62
	5.3.1. Evaluasi Statistik	63
	5.3.2. Evaluasi Ekonomi	79
	5.4. Analisa Kuantitatif	86
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	6.1. Kesimpulan	88
	6.2. Saran	89
	6.3. Keterbatasan Penelitian	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	DAFTAR LAMPIRAN	
	Lampiran 1	
	Lampiran 2	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Kinerja BPR di Jawa Tengah per 31 Desember 1996 – 2000	
Tabel 2	Tingkat Kesehatan BPR di Jawa Tengah per Desember 1996 – 31 Desember 2000	5
Tabel 3	Jumlah BPR Bermasalah Struktural per Kabupaten di Wilayah Kerja Bank Indonesia Semarang per 31 Desember 1998 – 2000	7
Tabel 4	Perkembangan Jumlah BPR di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang tahun 1997 – 1999	38
Tabel 5	Perkembangan Usaha BPR di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang tahun 1997 – 1999	41
Tabel 6	Perkembangan BPR Menurut Dati II di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang Tahun 1997 – 1999	48
Tabel 7	Perkembangan Jumlah BPR Bermasalah Struktural di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang Tahun 1997 – 1999	55
Tabel 8	Koefisien Regresi Logistik	59
Tabel 9	Koefisien Regresi Logistik untuk Variabel Karakteristik	61

Tabel 10	Koefisien Regresi Logistik untuk Variabel Kondisi Ekonomi Lokal	62
Tabel 11	Hosmer - Lemeshow Test	64
Tabel 12	Nagelkerke R Square	66
Tabel 13	Koefisien Regresi Logistik	68
Tabel 14	Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Proxy CAMEL (Dua Tahun Sebelum Kebangkrutan)	73
Tabel 15	Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Karakteristik (Dua Tahun Sebelum Kebangkrutan)	74
Tabel 16	Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Kondisi Ekonomi Lokal (Dua Tahun Sebelum Kebangkrutan)	75
Tabel 17	Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Proxy CAMEL (Satu Tahun Sebelum Kebangkrutan)	76
Tabel 18	Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Karakteristik (Satu Tahun Sebelum Kebangkrutan)	77
Tabel 19	Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Kondisi Ekonomi Lokal (Satu Tahun Sebelum Kebangkrutan)	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Logistik Regresi BPR Bermasalah Struktural	
Tahun 1999	94
1. Variabel Proxy CAMEL	94
2. Variabel Karakteristik	98
3. Variabel Kondisi Ekonomi Lokal	102
Lampiran 2	
Logistik Regresi BPR Bermasalah Struktural	
Tahun 1999	107
1. Variabel Proxy CAMEL	107
2. Variabel Karakteristik	112
3. Variabel Kondisi Ekonomi Lokal	116

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimulai dari pertengahan tahun 1997, dunia perbankan memasuki era kemelut yang ditandai dengan krisis moneter yaitu gejolak nilai tukar sebagai akibat pelepasan “*band intervensi*” Bank Indonesia. Gejolak nilai tukar yang hampir tidak dapat dibendung oleh Bank Indonesia menyebabkan beberapa bank mengalami kesulitan dalam kegiatan operasinya terutama bank yang selama itu mempergunakan dana jangka pendek dari luar negeri dan semakin banyaknya *non performing loan* dari sebagian besar nasabahnya. Kesulitan yang dialami oleh perbankan tersebut semakin parah sejak adanya likuidasi 16 bank pada tanggal 1 November 1997 dan kebijakan Bank Indonesia tersebut menyebabkan adanya gelombang *rush* masyarakat serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran perbankan. Akibat gelombang krisis tersebut, perbankan nasional mengalami penurunan kinerja yang sangat dratis dan umumnya bank mengalami modal negatif, kualitas aktiva produktif (KAP) sangat buruk, kerugian yang besar dan hampir semua bank mengalami kemunduran dalam tingkat kesehatannya.

Menyadari permasalahan tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah langkah penyehatan dan restrukturisasi terhadap perbankan nasional yang antara lain ditempuh kebijakan sebagai berikut:

UPT-POSTAK-UNDIP

1. Pemberian jaminan pembayaran kewajiban Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
3. Penyelesaian masalah Bank melalui BPPN.

Ke 3 (tiga) langkah yang diambil oleh Pemerintah tersebut nampaknya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perbankan nasional. Walaupun tingkat kepercayaan mulai tumbuh, namun masalah intermediasi bank belum jalan, sehingga Pemerintah melakukan kebijakan tambahan sebagai berikut :

1. Peningkatan modal Bank (Rekapitulasi).
2. Penggabungan usaha (*Marger*) Bank Pesero.
3. Penyelesaian penyehatan lanjutan Bank di bawah BPPN
4. Penyempurnaan Undang Undang Perbankan dan *Prudential Banking Regulation*.

Namun langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah tersebut hanya diperuntukkan Bank Umum, sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kebijakan yang dilakukan adalah **pemberian jaminan terhadap pembayaran kewajiban** saja. Langkah langkah konkrit kebijakan Pemerintah untuk BPR hingga kini masih belum kelihatan, hal ini dapat dimaklumi karena secara nasional asset BPR di bawah 10% dari asset Bank Umum, namun dari segi jumlah, di Indonesia saat ini terdapat 7.772 BPR dan sebesar 587 BPR berada di Jawa Tengah. Dari 587 BPR yang berlokasi di Jawa Tengah, asset yang telah dikembangkan per Desember 2000 telah mencapai Rp1.026 Milyar, sementara itu dibandingkan dengan Bank Umum di Jawa

Tengah yang berjumlah 47 buah dengan asset mencapai Rp 36.435 Milyar, sehingga peran BPR nampaknya tidak mempunyai arti. Namun dibalik itu, BPR mempunyai misi penting dalam pembangunan utamanya bagi masyarakat kecil yang tidak dapat dilayani oleh Bank Umum.

Tabel 1
Kinerja BPR di Jawa Tengah
per 31 Desember 1996 - 2000

Keterangan	1996	1997	1998	1999	2000
Jumlah BPR	411	431	438	586	587
Jumlah Dana(Rp juta)	253.610	249.989	202.439	430.086	759.094
Jumlah Kredit(Rp juta)	374.218	401.875	337.558	527.068	880.455
Jumlah Asset(Rp juta)	430.005	454.916	460.240	697.259	1.078.998
Jumlah Kredit Macet (Rp juta)	10.172	15.330	23.330	31.374	37.821

Sumber : Bank Indonesia Semarang

Selama 5 tahun terakhir, kinerja BPR Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dari segi jumlah, jumlah BPR meningkat sebesar 42,82%, pengerahan dana meningkat 199,32%, kredit meningkat 145,80% dan asset meningkat sebesar 2.243,93%. Namun dibalik membaiknya kinerja BPR tersebut, terdapat periode penurunan yaitu pada mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Pada periode tersebut imbas krisis moneter ternyata mempunyai pengaruh yang sangat significant dan

ini terlihat dari kinerja BPR di Jawa Tengah, penurunan kinerja utamanya terjadi pada tahun 1998 yaitu dari segi pengerahan dana masyarakat mengalami penurunan sebesar 20,18% dan kredit menurun sebesar 16,1%. Walaupun jumlah asset terus meningkat namun dari segi *bad loan* (kredit macet) juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 1996 sampai dengan tahun 2000) pertumbuhan kredit macet BPR mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai 105,89%. Dampak dari penurunan kinerja pada periode tahun 1997 hingga tahun 2000 adalah semakin banyaknya BPR yang bermasalah yaitu BPR yang mempunyai tingkat kesehatan Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Umumnya masalah BPR selama periode krisis adalah buruknya kredit, kesalahan pengelolaan manajemen dan moral hazard pemilik.

Pengukuran tingkat kesehatan BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan BPR. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas atau lebih dikenal dengan CAMEL. Dengan menggunakan kriteria CAMEL tersebut, ditetapkan 4 pembobotan tingkat kesehatan yaitu; *Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat*. Dalam hal melakukan pembobotan tingkat kesehatan, Bank Indonesia mengacu pada ketentuan

Bank Sentral Internasional yang dikeluarkan oleh *Bank For International Settlement* (BIS) dan penerapan disesuaikan pada kondisi Indonesia.

Selama terjadi krisis perbankan yang dimulai dari tahun 1997 hingga tahun 1999, tingkat kesehatan BPR di Jawa Tengah umumnya cenderung menurun, bahkan diantaranya banyak yang mempunyai modal negatif dan tingkat kerugian yang sangat besar.

Tabel 2
Tingkat Kesehatan BPR di Jawa Tengah
Per 31 Desember 1996 - 31 Desember 2000

Keterangan	1996	1997	1998	1999	2000
Sehat	253(62,5%)	234(56,4%)	195(44,5%)	295(50,3%)	309(52,6%)
Cukup Sehat	97(23,6%)	88(20,4%)	84(19,2%)	120(20,5%)	124(21,1%)
Kurang Sehat	47(11,4%)	65(15,1%)	77(17,5%)	80(13,6%)	63(10,7%)
Tidak Sehat	14 (3,5%)	54(12,1%)	82(18,8%)	91(15,6%)	91(15,4%)
Jumlah	411 (100%)	431(100%)	438 (100%)	586 (100%)	587 (100%)

Sumber : Bank Indonesia Semarang

BPR yang Sehat pada tahun 1996 mencapai 62% dari total BPR di Jawa Tengah dan jumlah tersebut terus mengalami penurunan dimana pada tahun 1998 BPR Sehat di Jawa Tengah hanya sebesar 44% dari total seluruh BPR. Sebaliknya BPR Jawa Tengah yang Tidak Sehat jumlah terus meningkat yaitu dari 3% tahun 1996 menjadi 18,8% pada tahun 1998. Umumnya penurunan tingkat kesehatan BPR tersebut disebabkan oleh

semakin memburuknya kualitas aktiva produktif (KAP) terutama pada kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Selain memburuknya KAP, penurunan tingkat kesehatan beberapa BPR juga disebabkan oleh peran manajemen dari Bank sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kinerja BPR menjadi semakin terpuruk dan berakibat modal BPR semakin berkurang bahkan diantaranya terdapat modal negatif dan kerugian sulit untuk dibendung.

BPR yang mengalami modal (CAR) negatif, tingkat kerugian yang sangat besar, KAP buruk dan manajemen buruk dimana pemilik/pengurus tidak mampu/bersedia memperbaiki kondisi BPR serta tingkat kesehatannya Tidak Sehat selama 18 bulan berturut turut oleh Bank Indonesia (Memorandum Bank Indonesia No 31/2/Sm/Rahasia tanggal 20 Oktober 1998) disebut *BPR bermasalah Struktural*. BPR bermasalah struktural ini dapat membahayakan perekonomian masyarakat setempat yang pada gilirannya akan membahayakan sistim keuangan karena BPR bermasalah struktural rentang terhadap resiko likuiditas.

Terhadap BPR bermasalah struktural ini, Bank Indonesia belum menentukan langkah kebijaksanaan yang pasti. Berbeda dengan penanganan Bank Umum yang secara tegas dilakukan secara terpusat pada Bank Indonesia Jakarta maka penanganan terhadap BPR diserahkan kepada Kantor Bank Indonesia yang membawahi. Di Jawa Tengah secara operasional pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang yang membawahi 3 (tiga) Kantor Bank Indonesia yaitu; Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Kantor Bank Indonesia Solo dan Kantor Bank Indonesia Purwokerto.

Tabel 3
Jumlah BPR Bermasalah Struktural per Kabupaten
di Wilayah Kerja Bank Indonesia Semarang
Per 31 Desember 1998 – 2000

Kabupaten	1998	1999	2000
Kab Semarang	1	1	2
Kab Purwodadi	0	0	1
Kab Demak	4	4	4
Kab Pati	3	4	10
Kab Kudus	3	3	3
Kab Rembang	2	4	6
Kab Blora	1	2	4
Kab Magelang	1	1	0
Kab Temanggung	4	4	6
Kab Wonosobo	0	1	1
Kab Kebumen	0	0	1
Kab Tegal	1	2	2
Kab Pekalongan	4	6	7
Kab Batang	0	0	1
Jumlah	24	31	48

Sumber : Bank Indonesia Semarang

Dari hasil inventarisasi Bank Indonesia Semarang jumlah BPR bermasalah struktural di wilayah Bank Indonesia Semarang sejak tahun 1998 terus meningkat dari 24 BPR menjadi 48 pada tahun 2000.

Guna menyetatkan kembali BPR bermasalah struktural tersebut, Bank Indonesia Semarang selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 1999 dan 2000 telah mengadakan "*financial review*" terhadap 48 BPR bermasalah struktural. Pola *financial review* yang diterapkan oleh Bank Indonesia Semarang terhadap BPR bermasalah struktural adalah *menambah modal agar mencapai CAR 8% dan pembuatan bisniss plan yang intinya rencana perbaikan CAMEL dari BPR yang bersangkutan*. Namun dalam perkembangannya BPR yang diadakan *financial review* tersebut kurang mengembirakan bahkan terdapat beberapa BPR bermasalah struktural yang semakin terpuruk kinerjanya dan menjurus pada kebangkrutan.

Bertitik tolak dari hasil kajian *financial review* tersebut di atas, dalam penelitian ini akan dianalisis lebih mendalam mengenai semakin terpuruknya kinerja BPR bermasalah struktural, terutama BPR bermasalah struktural yang sebenarnya secara finansial telah bangkrut. Arah penelitian ini adalah prediksi kebangkrutan BPR bermasalah struktural dengan menitik beratkan hubungan antara kinerja dan profitabilitas, sehingga dari sampel BPR bermasalah struktural di Jawa Tengah dapat dianalisa prediksi kebangkrutannya.

Kebangkrutan usaha bank hingga kini belum ada ukuran yang secara jelas dapat dijadikan pedoman dalam lingkup sistim perbankan maupun kalangan akademisi. Saat ini pengertian kebangkrutan bank adalah likuidasi bank yang lebih dititik beratkan pada penilaian kualitatif dan hal ini secara implisit tersirat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yang intinya suatu

Bank dapat ditutup apabila dalam operasinya membahayakan sistim keuangan. Ukuran membahayakan sistim keuangan tersebut secara kuantitatif belum ada penjelasan secara rinci. Sehubungan dengan hal di atas, dalam penelitian ini akan dicari suatu ukuran kuantitatif yang masih harus dibuktikan keabsahannya melalui penelitian ini. Sebagai pedoman di dalam memprediksi kebangkrutan suatu bank akan dilihat dari profitabilitasnya dengan menggunakan ukuran profitabilitas dari Kitab Undang Undang Dagang (KUHD) pasal 47 yaitu *suatu perusahaan dapat dikatakan bubar demi hukum apabila telah menderita kerugian 75% dari modalnya*.

Studi empiris mengenai kebangkrutan usaha mulai diteliti oleh Beaver (1966 – 1968) dengan menggunakan 6 (enam) kelompok rasio keuangan. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah model univariat per rasio keuangan yang diprediksinya. Hasil penelitian Beaver tersebut menunjukkan bahwa *cash flow ratio (cash flow to total debt)* merupakan indikator paling kuat di dalam memprediksi kebangkrutan sebuah perusahaan.

Penelitian kebangkrutan perusahaan di Amerika juga dilakukan oleh Altman (1968) dengan menggunakan metoda *Multiple Discriminant Analysis (MDA)*. Altman mengambil sampel 66 perusahaan yang dibagi 2 (dua) kelompok yaitu perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut untuk periode amatan 1946 sampai dengan tahun 1965. Adapun model MDA Altman tersebut menggunakan 5 (lima) rasio keuangan dan hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat ketepatan MDA dalam memprediksi kebangkrutan bank mencapai 94% setelah di uji dengan *Z score*.

Berbeda dengan Altman dengan MDA, pada tahun 1989 Ohlson melakukan peneliti prediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan metoda analisis logit kondisional untuk menghilangkan masalah MDA. Adapun variabel bebas yang digunakan Ohlson lebih luas tidak saja *variable financial*, tapi juga *variable macro economic* seperti inflasi dan GNP. Hasil penelitian Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan mempunyai ketepatan 96,3%.

Whalen dan Thomson pada tahun 1988 menguji mamfaat rasio CAMEL (lima katagori resiko yang diperingkat dengan pengujian bank, yaitu *Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings dan Liquidity*) untuk mengidentifikasi perubahan kondisi bank. Sampel yang digunakan adalah 58 bank di Amerika Serikat dengan 22 rasio keuangan. Alat statistik yang digunakan adalah regresi logistik dan hasilnya menunjukkan bahwa CAMEL dapat digunakan secara akurat untuk memprediksi kebangkrutan bank dengan ukuran terbaiknya 90,9%. Selain itu, Thomson memperbaiki penelitiannya terhadap kebangkrutan bank tahun 1991 dengan mengambil sampel 770 bank bangkrut dan 1.736 bank sehat. Alat statistik yang digunakan adalah analisa regresi logit dengan variable dependennya DFAIL (*1 for failed bank dan 0 otherwise*) sedangkan variabelnya independentnya adalah rasio CAMEL dengan beberapa variabel ekonomi lainnya yang masih terkait dengan faktor CAMEL. Hasil penelitian Thomson ini adalah pengelompokan secara tepat lebih dari 94% dalam 6 – 12 bulan sebelum bank bangkrut dan sekitar 80% dalam 42 – 48 bulan sebelum bank bangkrut.

Di Indonesia beberapa peneliti telah melakukan pengujian manfaat rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan bank diantaranya adalah Surifah tahun

1999 dengan menggunakan model CAMEL sesuai dengan SE BI No 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Sampel yang digunakan terdiri dari 26 bank bangkrut dan 26 bank tidak bangkrut dengan waktu pengamatan 1993 – 1997. Alat statistik yang digunakan adalah model regresi logit. Hasil penelitian Surifah adalah *pertama* rata rata rasio CAMEL bank bangkrut lebih besar dibandingkan rata rata rasio CAMEL yang bangkrut, *kedua* rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu bank.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebenarnya kebangkrutan suatu usaha atau bank dapat diprediksi dan dianalisis lebih dini dengan menggunakan model *logistic linear regression*. Dengan model ini, BPR bermasalah struktural dapat diprediksi dan dianalisis kinerjanya untuk satu sampai dua tahun mendatang sehingga dapat membantu tugas Bank Indonesia dalam pengawasan dan pembinaan BPR.

1.2. Perumusan Masalah

Dari tahun 1998 hingga tahun 2000 jumlah BPR bermasalah struktural di wilayah kerja Bank Indonesia Semarang semakin bertambah sehingga apabila BPR tersebut tidak ditangani secara bijaksana dikhawatirkan akan mengganggu sistim keuangan di daerah Jawa Tengah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan dibawah ini

1. Apakah BPR bermasalah struktural yang mempunyai tingkat kerugian di atas 75% dari modal berpotensi untuk bangkrut

2. Apakah BPR bermasalah struktural yang tingkat kerugiannya tidak sampai 75% dari modal, berpotensi untuk tumbuh

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menentukan variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan BPR bermasalah struktural.
2. Mengadakan pengujian terhadap rasio *proxy* CAMEL dan Ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah.
3. Menentukan model peramalan yang cocok untuk BPR bermasalah struktural

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memperoleh model yang dapat menganalisa secara riil perubahan kinerja BPR bermasalah struktural
2. Merupakan alat tambahan bagi Bank Indonesia di dalam tugasnya sebagai pengawas dan pemeriksaan Bank
3. Dapat dipakai dalam model peramalan sistim deteksi dini (*early warning system*) pengawasan Bank

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka.

2.1.1. Konsep Dasar

Tradisi ilmu ekonomi menggunakan metode penelitian yang bersifat deduktif seperti yang telah diilhamkan oleh pemikir ekonomi Adam Smith dan David Ricardo. Namun demikian sejak 200 tahun yang lalu, telah dimulai metode yang bersifat empiris dengan menggunakan metode yang bersifat metode kasus yang dimotori oleh ekonom industri diantaranya adalah William Fellner, Paul Sweezy, George Stigler, Chamberlin, Mason dan lain lain.

Metode empiris ini telah berkembang lebih lanjut dikembangkan oleh Joe Stalen Bain yang mencari bukti empiris tentang hubungan antara struktur – perilaku dengan kinerja industri secara mikro. Pendekatan Bain ini lebih dikenal dengan dengan pendekatan *Structure - Conduct - Performance* (ECP) dengan menekankan pada pendekatan *Efficient – Structure* (EFF).

Pada tahun 1993, Lawrence G. Goldberg mengemukakan lebih detail mengenai konsep hubungan antara kinerja dengan profitabilitas pada industri perbankan dapat diteliti dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1) Pendekatan *Structure Conduct Performance (SCP)*

Pendekatan ini lebih menekankan pada karakteristik struktur dan kondisi industri perbankan dan apabila diimplikasikan pada perbankan nasional yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Struktur Industri Perbankan Nasional, yang merupakan lembaga kepercayaan dengan dibatasi aturan dan ketentuan yang ketat serta mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan secara internal maupun eksternal.
- b) Kondisi Industri Perbankan Nasional, yang saat ini dihadapkan pada berbagai masalah krisis antara lain CAR yang negatife, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang terus memburuk, CAMEL yang tidak sehat serta *Moral Hazard* pemilik bank.

2) Pendekatan *Efficient Structure (EFF)*

Fokus pendekatan ini adalah efisiensi yang muara pada profitabilitas, menurut Golgber, apabila struktur dan kondisi sangat menunjang dalam operasional industri, maka akan dicapai efisiensi yang pada gilirannya profitabilitas bias dicapai secara optimum. Apabila diimplikasikan pada kondisi perbankan nasional saat ini dimana struktur dan kondisi kurang kondusif maka dari data yang ada, rata rata perbankan nasional saat beroperasi kurang efisien.

Ke 2 (dua) pendekatan tersebut intinya bermuara pada penentuan profit dari suatu usaha, secara empiris pendekatan SCP sering di uji dengan penilaian kelangsungan suatu usaha perusahaan, sedangkan pada EFF bertitik tolak dari segi kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi dan biasanya mengarah pada faktor efisiensi.

Arah dari penelitian adalah menitik beratkan pada hubungan antara kinerja dengan profitabilitas. Dalam hal penganalisaan profitabilitas digunakan analisa keuangan dengan penggunaan rasio rasio keuangan yang merupakan *proxy* dari CAMEL. Selain itu juga digunakan pengukuran dari proxy non keuangan seperti Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), pendapatan perkapita dan umur BPR. Besaran profit suatu Bank dapat dijadikan pengukuran kebangkrutan usaha Bank karena hingga kini masalah kebangkrutan Bank baik Bank Umum maupun BPR belum ada ukuran-ukuran yang secara riil dapat dijadikan pedoman di dalam lingkup sistim perbankan maupun kalangan akademisi. Saat ini pengertian kebangkrutan Bank adalah likuidasi Bank yang pengukurannya tidak jelas, namun secara implisit tersirat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yang intinya suatu Bank dapat ditutup apabila dalam operasinya membahayakan sistim keuangan. Sehubungan dengan hal di atas, dalam penelitian ini akan di cari suatu model yang dapat memprediksi kebangkrutan suatu bank dengan menitik beratkan pada profitabilitas. Alasan penggunaan profitabilitas adalah Kitab Undang Undang Hukum

Dagang (KUHD) pasal 99 yaitu suatu perusahaan dapat dikatakan bubar demi hukum apabila telah menderita kerugian 75% dari modal.

2.1.2. CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity*)

Tolak ukur kinerja suatu bank umumnya digunakan besaran-besaran CAMEL, yang meliputi penilaian terhadap faktor faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Di Indonesia penilaian besaran CAMEL diatur sesuai dengan SE BI No 30/11/KEP/DIR/ tanggal 30 April 1997 yang merupakan ratifikasi dari *Bank For International Settlement* (BIS) yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam aturan Bank Indonesia tersebut, kinerja suatu bank (bank umum dan BPR) di katagorikan dalam 4 (empat) kreteria tingkat kesehatan yaitu: *sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat*.

Dalam penelitian ini, akan memanfaatkan rasio rasio dari *proxy* CAMEL BPR bermasalah struktural yaitu;

1) Faktor Permodalan

Faktor modal bank yang akan diteliti meliputi rasio modal terhadap asset dan modal murni setelah dikurangi *bad loan* (kredit macet) yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kinerja BPR bermasalah struktural.

2) Faktor Kualitas Aktiva Produktif.

Penelitian terhadap faktor ini meliputi antara lain rasio *bad loan* terhadap total kredit, rasio kredit lancar terhadap total asset yang diperkirakan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja BPR bermasalah struktural.

3) Faktor Manajemen.

Penelitian faktor manajemen meliputi antara lain rasio kredit *insider* terhadap total asset, rasio *overhead cost* terhadap total pendapatan, rasio biaya okupansi terhadap total asset rata-rata pertahun.

4) Faktor Efisiensi.

Penelitian terhadap faktor ini meliputi antara lain rasio laba bersih terhadap total asset rata rata pertahun, rasio bunga akrual terhadap total kredit, rasio laba bersih terhadap modal, rasio pendapatan non bunga terhadap total kredit dan rasio biaya bunga terhadap total biaya, dimana variabel keuangan tersebut diperkirakan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja BPR bermasalah struktural.

5) Faktor likuiditas.

Penelitian terhadap faktor ini meliputi antara lain rasio dana ketiga terhadap total asset, rasio dana fihak ketiga untuk ukuran nasabah kecil terhadap total asset rata rata pertahun, rasio dana ketiga bagi penabung besar terhadap total asset yang diperkirakan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja BPR bermasalah struktural.

2.1.3. Pengertian Kebangkrutan

Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai suatu kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kebangkrutan sebagai kegagalan usaha didefinisikan beberapa arti (Martin et.al, 1995; 376)

1) Kegagalan ekonomi

Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya diartikan sebagai perusahaan yang kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya, lebih lanjut berarti tingkat laba lebih kecil dari pada biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi apabila arus sebenarnya jatuh di bawah arus kas yang diharapkan bahkan ada yang menyebutkan kegagalan merupakan tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil dari biaya modal perusahaan.

2) Kegagalan Keuangan

Kegagalan keuangan biasanya diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan alur saham. Insolvensi arus kas ada 2 (dua) bentuk

a) Insolvensi Teknis

Perusahaan dapat dianggap gagal apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Walaupun total aktiva

perusahaan melebihi total pinjaman atau bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan hutangnya.

b) **Insolvensi Dalam Pengertian Kebangkrutan**

Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atas nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.

Sering dikatakan bahwa kebangkrutan identik dengan likuidisasi, namun secara hirarki pengertian tersebut terdapat perbedaan yang mendasar. Likuidisasi merupakan suatu proses yang berakhir pada pembubaran perusahaan sebagai suatu perusahaan, likuidisasi lebih menekankan aspek yuridis perusahaan sebagai badan hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Likuidisasi mempunyai 3 (tiga) arti yaitu (Info Bank, 1997 - 1998)

1) **Realisasi Tunai**

Yaitu penjualan kepemilikan dalam bentuk saham, obligasi atau komoditas, baik untuk memperoleh laba maupun mengantisipasi kerugian karena harga lebih rendah. Biasanya likuidisasi menunjuk kepada lebih memperpanjang suatu periode yang telah ditentukan.

2) **Pengakhiran usaha dengan cara mengkonversikan asset ke dalam uang tunai.**

3) **Suatu cara penyembuhan bagi seorang debitur yang tidak bisa membayar kewajibannya. Tujuan likuidisasi ini dititik beratkan pada realisasi asset dan kewajibannya ketimbang kesinambungan usaha debitur tersebut.**

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada tahun 1966, Beaver melaporkan sebuah studi yang membandingkan masing masing rasio dari 79 perusahaan bangkrut dengan perusahaan tidak bangkrut yang dilakukan terhadap kondisi 5 (lima) tahun sebelum kebangkrutan. Beaver menggunakan metode univariat dari 6 (enam) rasio keuangan yaitu *cash flow ratio*, *net income ratio*, *debt to total assets ratio*, *liquid to total assets ratio*, *liquid to current debt ratio* dan *turn over ratio*. Hasil penelitian Beaver tersebut menunjukkan bahwa *cash flow ratio* merupakan indikator paling kuat di dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Penelitian lanjutan yang memanfaatkan analisa keuangan dalam memprediksi kegagalan suatu perusahaan dilakukan oleh Altman pada tahun 1968. Altman menggunakan model *Multiple Discriminant Analysis*, (MDA) dengan 5 (lima) rasio keuangan dari 66 perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut yaitu; *working capital to total assets ratio*, *retained earning to total asset ratio*, *earning before tax to total asset ratio*, *market value equity to book value of total debt ratio* dan *sales to total asset ratio*. Model MDA Altman tersebut menghasilkan Z score yang formulanya adalah sebagai berikut

$$Z_i = 0,717 \text{ WC/TA} + 1,4 \text{ RE/TA} + 3,3 \text{ EBIT/TA} + 0,6 \text{ MVE/BUD} + 1,0 \text{ S/TA}$$

Hasil penelitian Altman menunjukkan bahwa tingkat ketepatan model MDA dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan adalah 94% setelah di uji dengan Z score. Namun penelitian Altman mempunyai kelemahan yaitu: *pertama*, untuk mengetahui bangkrut atau tidak bangkrut perusahaan dengan model MDA hanya didasarkan pada

alat peringkat ordinal yang tidak jelas, *dua*, dalam melakukan matching dengan kriteria besaran dan industri model MDA cenderung arbitrer.

Model MDA Altman tersebut di perbarui oleh Ohlson pada tahun 1980 dengan model *Conditional Logistic Analysis* (CLA). Ohlson meneliti 105 perusahaan bangkrut dan 2.058 perusahaan tidak bangkrut periode 1970 sampai dengan 1976 dengan menggunakan variabel rasio keuangan. Variabel rasio keuangan yang diteliti oleh Ohlson adalah: *size* $\{\log(\text{total asset}/\text{GNP price level index})\}$, *total liabilities/total asset*, *working capital/total asset*, *current liabilities/current assets*, *dummy variable* (1 if total liabilities > total asset, 0 otherwise), *net income/total asset*, *fund from operations/total liabilities*, *dummy variable* (1 if net income negative, 0 otherwise), *net income t -/ net income t-1 / net income t + net income t - 1*. Ohlson membagi model CLA menjadi 3 (tiga) yaitu; *pertama* memprediksi kebangkrutan 1 (satu) tahun sebelum pengumuman kebangkrutan, *dua* memprediksi kebangkrutan 2 (dua) tahun sebelum pengumuman kebangkrutan, *tiga* memprediksi kebangkrutan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) tahun pengumuman kebangkrutan. Hasil CLA Ohlson ini menunjukkan bahwa ketiga model tersebut *size* merupakan prediktor yang paling penting dalam memprediksi kebangkrutan, dengan ketepatan prediksi untuk seluruh variabel rasio keuangan sebesar 96,3%. Penelitian Ohlson ini menggambarkan model CLA dapat secara tepat dan pengambilan sampel sesuai dengan populasi antara perusahaan bangkrut dengan yang tidak bangkrut.

Dalam kebangkrutan suatu Bank, Thomson pada tahun 1988 melakukan penelitian terhadap kebangkrutan Bank di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Tujuan

penelitian Thomson adalah membuat model kebangkrutan Bank untuk semua ukuran dengan variable *proxy* CAMEL berdasarkan data Neraca dan Laporan Laba Rugi suatu Bank. Dalam penelitian ini konsep CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings and Liquidity*) digunakan oleh Thomson untuk dasar seleksi rasio keuangan bank yang diduga relevan. Thomson juga memasukkan 4 (empat) ukuran untuk kondisi ekonomi dalam pasar Bank agar dapat melihat pengaruh dari kondisi ekonomi lokal terhadap solvensi Bank, yaitu; *unemployment, growth in personal income, business failure rate* dan diversifikasi ekonomi. Data yang digunakan oleh Thomson terdiri dari 1.736 Bank yang sehat dan 770 Bank yang gagal dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989. Adapun model yang digunakan adalah *logit regression* dan hasil dari penelitian tersebut adalah probabilitas suatu Bank akan gagal merupakan fungsi dari variabel variabel yang berhubungan solvensi, termasuk *capital adequansi, asset quality, management quality, earning performance dan liquidity portfolio*. Adapun variabel kondisi ekonomi dimana Bank berada juga memperlihatkan kemungkinan Bank mengalami kegagalan dalam waktu tertentu.

Di Indonesia, penelitian mengenai kebangkrutan banyak juga dilakukan oleh beberapa peneliti dan hal ini dilakukan oleh Surifah (1999) dengan menguji rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan bank menggunakan model CAMEL sesuai SE BI No 30/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Sampel terdiri atas 26 bank yang bangkrut (likuidasi) dan 26 bank yang tidak bangkrut. Rasio CAMEL dikelompokkan menjadi kapital (7 rasio), kualitas aktiva produktif (2 rasio), manajemen (9 rasio), *earning* (5 rasio) dan likuiditas (5 rasio) dengan periode pengamatan tahun 1993 –

1997. Alat statistik yang digunakan adalah model statistik logit dan menghasilkan, *pertama*, rata rata rasio CAMEL bank tidak bangkrut lebih besar dibandingkan dengan rata rata rasio CAMEL bank yang bangkrut pada tahun tahun sebelum bank bangkrut maupun bank tidak bangkrut. *Kedua*, rasio keuangan CAMEL dapat digunakan sebagai alat prediksi kebangkrutan suatu bank.

Peneliti lainnya, Etty M. Nasser dan Titik Aryati (2000) dengan model CAMEL melakukan prediksi *financial distress*, dengan menggunakan analisa *univariat* dan *multivariate*. Pengujian *univariat* dilakukan dengan pengujian terhadap beberapa rasio keuangan secara individual tanpa mempertimbangkan rasio rasio keuangan lainnya. Sedangkan dalam analisis *multivariate* dilakukan dengan *multiple discriminant analysis*. Sampel yang digunakan adalah seluruh bank yang sudah go publik, terdiri dari 8 bank sehat dan 9 bank yang gagal. Penelitian menggunakan dua variabel yaitu *pertama*, variabel dependen dengan mengkatagorikan bank sehat diberi angka 1 dan bank gagal dengan angka 2. *Kedua*, variable independen merupakan rasio keuaangan CAMEL yang terdiri dari aspek permodalan (CAR1, CAR2 dan ETA), aspek kualitas aktiva produktif (RORA dan ALR), aspek manajemen (NPM, OPM), aspek rentabilitas (ROA, ROE, BOPO, PBTA) dan aspek likuiditas (EATAR dan LDR). Hasil penelitian uji univariat menunjukkan bahwa ada dua jenis rasio keuangan dalam CAMEL yaitu EATAR (*Earning Asset to Total Asset Ratio*) dan OPM (*Operating Profit Margin*) yang signifikan dapat membedakan bank sehat dan bank gagal. Sedangkan dalam analisis diskriminan pengujiannya dilakukan dengan, *pertama*, *Stepwise Statistic* terhadap dua variable signifikan uji *univariat* (EATAR dan OPM) yang menghasilkan persamaan

$D = -0,341 + 0,01EATAR - 6,925OPM$, *kedua Casewise Statistic* menghasilkan tingkat keberhasilan prediksi untuk empat tahun sebelum bangkrut adalah 67,6%. Selanjutnya peneliti menyadari beberapa keterbatasan antara lain faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga, subsidi Pemerintah belum dipertimbangkan dan factor-faktor tersebut diyakini oleh peneliti mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan bank. Keterbatasan lainnya adalah Laporan Keuangan sebagai data rasio mempunyai keterbatasan pula.

Wilopo (2000) melakukan penelitian dalam memprediksi kerbangkrutan bank di Indonesia dengan populasi penelitian adalah seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, yaitu sebanyak 235 bank umum untuk periode akhir 1996 dan 215 bank umum sampai akhir tahun 1977. Alat statistik yang dipergunakan adalah regresi logit dengan model persamaan :

$$KDS = a + b(CAR) + c(RORA) + d(RCP) + e(NRF) + f(PBAP) + g(ROA) + h(BMPK) + i(FBS) + j(GR) + k(NPM) + l(ROE) + m(TBO) + n(LDR) + o(\ln Asset) + p(KRLC) + q(MNJ)$$

Keterangan :

- KDS = Kondisi bank (bank bangkrut dan tidak bangkrut)
- CAR = *Capital Adequacy Ratio* (rasio kecakupan modal)
- RORA = *Return on Risk Asset*
- RCP = Rasio Cadangan Pengusutan
- NRF = *Net Revenue from Fund*
- PBAP = Perbandingan Pendapatan Bunga dengan Aktiva Produktif

- ROA = *Return on Asset*
- BMPK = Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada kelompok terkait
- FBS = *Fee Based Income* (besarnya pendapatan bukan bunga)
- GR = *Growth* (pertumbuhan bank)
- NPM = *Net Profit Margin*
- ROA = *Return On Equity*
- BOPO = Perbandingan biaya operasi dan pendapatan operasi
- LDR = *Loan to Deposit Ratio*
- Ln Asset = logaritma nilai aktiva tetap untuk mengukur besaran (*size*) bank
- KRLC = Kredit lancar (variable dummy) untuk mengukur kepatuhan pada Bank Indonesia
- MNJ = Manajemen (variable dummy) untuk mengukur ketaatan pada Bank Indonesia untuk BMPK

Adapun hasil pengujian regresi logit menunjukkan bahwa variabel yang digunakan untuk kebangkrutan dapat memprediksi dengan ketepatan 92,55%. Selain itu dari 7 sampel bank bangkrut (likuidasi) tahun 1997 semua diprediksi tidak dilikuidasi (kesalahan tipe 1). Hal ini mempunyai arti bahwa dengan rasio keuangan CAMEL sebenarnya bank tersebut tidak bangkrut (likuidasi), dengan demikian bank bangkrut (likuidasi) disebabkan karena adanya faktor diluar rasio keuangan model CAMEL. Selain itu Wilopo menyadari beberapa keterbatasan penelitiannya antara lain tidak memperhitungkan faktor faktor lain seperti kondisis ekonomi (pertumbuhan ekonomi,

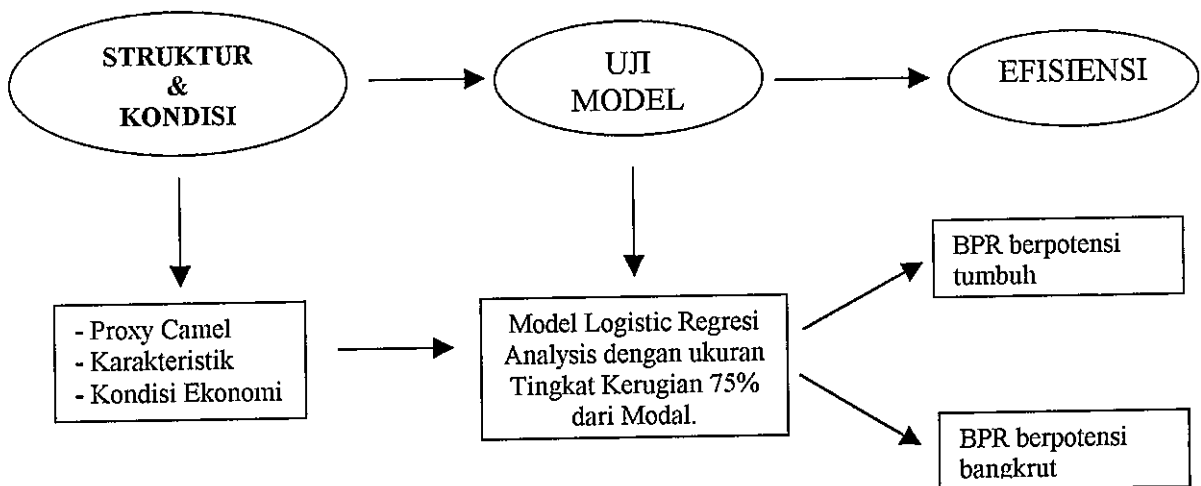
tingkat pengangguran, inflasi) serta parameter politik saat itu karena kesulitan pengukurannya.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1. Gambar Model

Guna memudahkan kerangka pikir teoritis, dapat digambarkan alur model sebagai berikut

Gambar 1
Hubungan antara SCP – EFF dengan
Uji Model Kebangkrutan



Struktur suatu BPR secara spesifik dapat diimplikasikan dengan suatu lembaga kepercayaan masyarakat utamanya masyarakat kecil, yang dibatasi dengan aturan-aturan ketat seperti Undang Undang, Peraturan Bank Indonesia dan lain lain serta dari

segi resiko mempunyai sensitivitas yang tinggi. Di sisi lain kondisi BPR dihadapkan pengaruh eksternal dan internal yang dapat terlihat dari pengaruh kiris dan kepemilikan.

Kedua pendekatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja BPR yang tercermin dari efisiensi yang pada gilirannya bermuara pada profitabilitas. Dalam kaitan ini, penelitian diarahkan seberapa jauh pengaruh struktur dan kondisi terhadap kinerja BPR yang terlihat dari pencapaian profit. Adapun sebagai ukuran kuantitatif dari ukuran struktur dan kinerja dalam penelitian ini adalah *Proxy CAMEL*, karakteristik BPR, dan kondisi ekonomi lokal. Sedangkan alat uji yang digunakan adalah *Logistic Linier Regression* dengan ukuran penetapan efisiensi dari KUHD yaitu suatu perusahaan dinyatakan bubar demi hukum apabila telah menderita kerugian 75% dari modal sehingga hasil yang diharapkan adalah apakah BPR yang akan diuji tersebut dapat dinyatakan bubar/bangkrut atau sebaliknya yaitu tetap tumbuh. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk memprediksi kebangkrutan BPR yang di uji, sehingga hasil penelitian dapat digunakan oleh pengambil keputusan utamanya Bank Indonesia dalam pengawasan Bank.

2.4. Hipotesa

Kebangkrutan BPR bermasalah struktural dapat diprediksi melalui kinerja BPR yang dipengaruhi oleh kelompok variable CAMEL, kelompok karakteristik BPR, kelompok kondisi ekonomi lokal. Bertitik tolak dari kerangka masalah di atas, dapat di tarik hipotesa bahwa di duga prediksi kinerja BPR mempunyai pengaruh langsung

terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural. Dengan demikian, semakin memburuk kinerja BPR akan berpotensi terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural. Berdasarkan hal diatas, dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

- 1) H1 = *Equity* yaitu rasio modal terhadap total aset BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 2) H2 = *Ncapta*, yaitu rasio modal dikurangi *non performing loan* terhadap total aset BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah structural.
- 3) H3 = *Bad Loan*, yaitu rasio total *performing loan* terhadap total kredit BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 4) H4 = *Loanta* yaitu rasio kredit lancar terhadap total aset BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 5) H5 = *Insider*, yaitu BMPK terhadap total modal BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 6) H6 = *Overhead*, yaitu rasio biaya *overhead* terhadap total pendapatan BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 7) H7 = *Occupancy*, yaitu rasio biaya okupansi terhadap total aset rata-rata pertahun BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 8) H8 = *ROA*, yaitu rasio laba bersih terhadap total asset rata-rata pertahun

BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural

- 9) H9 = *Uncollected* yaitu rasio bunga akrual terhadap total kredit BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 10) H10 = *LPR*, yaitu rasio pendapatan provisi dan administrasi terhadap total kredit BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 11) H11 = *ICR*, yaitu rasio biaya bunga terhadap total biaya BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 12) H12 = *ROE* yaitu rasio laba bersih terhadap total biaya BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 13) H13 = *Large time*, yaitu rasio dana III kelompok deposito besar terhadap total aset BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 14) H14 = *Core*, yaitu rasio dana III kelompok deposito kecil terhadap total aset BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 15) H15 = *LDR* yaitu rasio dana III terhadap total kredit BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah structural.

- 16) H16 = *Kelompok Variabel Karakteristik* yang terdiri size, konsentrasi, owner, budaya, market share dan growth nasabah mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural.
- 17) H17 = *Kelompok Variabel Kondisi Ekonomi Lokal* yang terdiri dari perkapita, unemploy, GDP dan umur BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian deskriptif analisis. Di dalam penentuan suatu BPR bermasalah struktural atau tidak, akan diperoleh data penelitian dari Bank Indonesia Semarang yang kemudian dilanjutkan pada penelitian lapangan terhadap BPR bermasalah struktural yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang. Selain itu, penelitian deskriptif dilakukan dengan menganalisa Laporan Bulanan BPR bermasalah struktural di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang berupa data histories Neraca, Laporan Laba Rugi dan Tingkat Kesehatan (TKS).

3.1. Jenis, Sumber dan Sampel Data

Populasi dari penelitian ini meliputi seluruh BPR bermasalah struktural yang ada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu BPR bermasalah struktural yang mengalami kerugian di atas 75% dari modal dan BPR bermasalah struktural yang mengalami kerugian dibawah 75% dari modal. Periode amatan sampel adalah selama 2 (dua) tahun yakni 1998 - 1999 dan 1999 - 2000.

Sampel diperkirakan 53 BPR bermasalah struktural yang ada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang dan 11 BPR diantaranya mengalami tingkat kerugian di atas 75% dari modal.

3.2. Model Analisis

Ada beberapa model analisis yang biasa digunakan untuk memprediksi kebangkutan suatu Bank yaitu :

- 1) *Ordinary Least Square Multiple Regression*
- 2) *Disciminant Analysis*
- 3) *Logistic Regression Analysis*

Dalam penelitian ini akan digunakan *Model Regression Analysis* oleh karena variabel dependen dalam model adalah binary atau dummy, yaitu:

- a) Nilai 1 (satu) untuk BPR bermasalah struktural yang berpotensi bangkrut dengan tingkat kerugian di atas 75% dari modal.
- b) Nilai 0 untuk BPR bermasalah structural yang berpotensi tumbuh yang mempunyai kerugian dibawah 75% dari modal.

Disamping itu, *classification accuracy* dari *model logistic regression* ini lebih baik dibandingkan dari pada model model lainnya dan juga tidak sensitive terhadap jumlah sampel dengan frekuensi yang sama (Maddala, 1983).

Sedangkan variable independennya adalah :

1. Rasio keuangan sebagai *proxy* pengukuran CAMEL

2. Karakteristik dari BPR bermasalah struktural yang meliputi asset, lokasi, budaya, kepemilikan.
3. Kondisi ekonomi regional.

Secara matematis, modal *Logistic Regression Analysis* dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Log} \frac{\text{Prob (BPR Bangkrut)}}{1 - \text{Prob (BPR Bangkrut)}} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

- a. Prob (BPR Bangkrut) merupakan BPR bermasalah struktural yang berpotensi bangkrut dengan tingkat kerugian di atas 75% dari modal.
- b. 1 - Prob (BPR Bangkrut) merupakan BPR bermasalah struktural yang berpotensi tumbuh yang tingkat kerugiannya dibawah 75% dari modal.
- c. Variabel X_s merupakan variabel independen yang terdiri dari kelompok *proxy* CAMEL, kelompok karakteristik BPR bermasalah struktural dan kelompok kondisi ekonomi lokal.
- d. b merupakan *koeffisien parameter logistic regressi*.

Model *Logistic Regression* ini akan ditaksir dengan menggunakan *non linier maximum lokehood estimation techniques* dengan tujuan agar dapat menaksir parameter regressi yang memaksimumkan probalitas atau *likelihood observation* data sample. Jadi model *logistic regression* menentukan probalitas bahwa variable khusus yaitu kelompok

variabel dari *proxy* CAMEL, karakteristik BPR bermasalah struktural dan kondisi ekonomi lokal apa saja yang dapat digunakan menentukan katagori BPR bermasalah struktural yang bangkrut dikemudian hari.

3.3. Definisi Operasional

3.3.1. Kelompok Variabel *Proxy* CAMEL

Capital Risk

X1 *Equity* = rasio total modal terhadap total aset.

X2 *Ncapta* = rasio modal dikurangi *Non Performing Loan* terhadap total aset

Adequancy Risk

X3 *Bad loan* = *Non Performing Loan* terhadap total kredit

X4 *Loanta* = rasio kredit lancar terhadap total aset

Management Risk

X5 *Insider* = BMPK terhadap total aset

X6 *Overhead* = rasio biaya *Overhead* terhadap total pendapatan

X7 *Occupancy* = rasio biaya Okupansi terhadap total aset rata-rata
pertahun

Earning Risk

X8 ROA	= rasio laba bersih terhadap total aset rata- rata pertahun
X9 Uncollected	= rasio bunga <i>Accrual</i> terhadap total kredit
X10 LPR	= rasio pendapatan provisi dan administrasi terhadap total kredit
X11 ICR	= rasio biaya bunga terhadap total biaya
X12 ROE	= rasio laba bersih terhadap modal

Liquidity Risk

X13 <i>Large Time</i>	= rasio Dana III kelompok depositan besar terhadap total aset.
X14 <i>Core</i>	= rasio Dana III kelompok depositan kecil terhadap total a aset.
X15 LDR	= rasio Dana III terhadap total kredit

3.3.2. Variabel Karakteristik

X16 <i>Size</i>	= logaritma total aset
X17 Konsentrasi	= jumlah BPR dalam satu lokasi terhadap total BPR
X18 <i>Owner</i>	= dummy 1 untuk BPR Pemerintah, 0 untuk BPR milik swasta.
X19 Budaya	= dummy (0 = pantai, 1 = agraris, 2 = kota)
X20 <i>Market Share</i>	= total kredit BPR yang diobservasi terhadap total

kredit seluruh BPR

X21 *Growth* Nasabah = pertumbuhan jumlah nasabah baru.

3.3.3. Variabel Kondisi Ekonomi Lokal

X22 Perkapita	= pendapatan perkapita penduduk
X23 <i>Unemploy</i>	= tingkat pengangguran penduduk
X23 GDP	= PDRB
X24 Umur BPR	= dummy 1 untuk umur BPR = 5 tahun dan 0 untuk umur BPR < 5 tahun

3.4. Teknik Pengujian

Pengujian kesahihan penelitian dilakukan dengan menentukan nilai ratio F. Nilai rasio F yang besar mengindikasikan bahwa persamaan regresi dapat menjelaskan variasi dari variable dependen. *Likelihood ratio test* berfungsi sama dengan uji F test yaitu menguji *overall fit* dari *logistic regression* (Stanton dan Bryan, 1990).

Jadi *likelihood ratio* menguji apakah variable independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen dimana probabilita BPR bermasalah struktural akan bangkrut. Untuk menguji hubungan masing masing variabel independen terhadap variabel dependen atau uji signifikansi parsial digunakan uji wald atau sama dengan uji t dalam regresi linear.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah singkat perkembangan BPR .

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan istilah yang muncul sejak Pemerintah menerbitkan peraturan di bidang keuangan moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988. Istilah BPR disebut secara resmi di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.38 tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta tertuang dalam peraturan pelaksanaannya. Tugas BPR berkaitan dengan kegiatan usahanya diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek-praktek ijon dari para pelepas uang.

Sebelum Pakto 1988, BPR didefinisikan pada BAB IX mengenai Ketentuan Peralihan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa: Bank desa, Lumbung desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan bank-bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat berlakunya Undang-Undang tersebut telah ada, tetap menjalankan tugasnya dalam sistem perbankan berdasarkan Undang-Undang dimaksud. Jenis bank tersebut diistilahkan sebagai bank sekunder dan Bank Pedesaan atau *Rural Bank*. Dengan berlakunya Pakto 1988 dan disempurnakan pada bulan November 1989, BPR cq. Bank Pasar dibedakan menjadi Bank Pasar Gaya Lama dan Bank Pasar Gaya Baru.

Bank Pasar Gaya Lama adalah bank pasar yang telah ada sebelum diberlakukannya Pakto 1988. Sejarah berdirinya Bank Pasar bermula dengan

didirikannya Bank Priyayi atau Bank Pegawai pada bulan Desember 1895 di Purwokerto yang memberikan pinjaman kepada pegawai, tukang dan petani dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat miskin dari jeratan rentenir dan pengijon. Pada tahun 1897 di Purwokerto berdiri Bank Bantuan Tabungan dan Kredit Pertanian. Memperhatikan banyaknya manfaat yang diberikan dengan didirikannya bank tersebut, didirikan bank serupa diberbagai daerah di Indonesia dan diberi nama Bank Rakyat yang kemudian berkembang menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1898 didirikan 250 Lumbung Desa di daerah Kabupaten Purwokerto yang memberikan pinjaman dalam bentuk padi dan menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk padi. Dalam perkembangannya pinjaman yang diberikan berubah menjadi bentuk uang sehingga pada tahun 1904 Lumbung Desa berubah menjadi Bank Desa. Pada periode selanjutnya yakni pada tahun 1910, didirikan Bank Pasar kemudian Pemerintah Daerah baik Kotapraja maupun Kabupaten mendirikan Bank Pasar di dalam wilayah kerjanya. Dalam perjalanannya Bank Pasar mengalami kesulitan pembiayaan sehingga banyak yang menutup usahanya. Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Tengah No.232/1970-12/19/27 tanggal 19 November 1979 mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Tujuan pendirian tersebut adalah untuk membangun perekonomian di daerah Jawa Tengah. Bank Pasar yang telah ada sebelum berlakunya Pakto 1988 dapat bekerja ditempat semula tetapi tidak diperkenankan pindah keluar wilayah kecamatan tempat kedudukannya. Sedangkan Bank Pasar Gaya Baru merupakan bank yang didirikan sesudah dan sesuai dengan Pakto 1988.

Dengan adanya berbagai penyempurnaan ketentuan, pendirian BKK yang disponsori oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan statusnya menjadi BPR. Peran pendirian BPR setelah Pakto 1988 adalah untuk menyebarluaskan pelayanan perbankan berupa jasa-jasa perbankan hingga ke pedesaan untuk menunjang dan memodernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan pelepas uang di wilayah pedesaan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan dunia, maka pengaturan perbankan disesuaikan dengan perkembangan tersebut khususnya untuk mengatasi krisis ekonomi dengan dilakukannya penyempurnaan UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU. No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan adanya perubahan tersebut bentuk usaha BPR berkembang dengan munculnya BPR dengan prinsip-prinsip Syariah yang mendasarkan kegiatan BPR berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya perkembangan tersebut, sumber pembiayaan usaha kecil di daerah semakin beragam sehingga kegiatan perekonomian di daerah dapat semakin berkembang.

4.2. Gambaran Umum BPR di Wilayah Kerja KBI. Semarang.

Jumlah BPR di Wilayah Kantor Bank Indonesia Semarang dalam 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 1997 sampai dengan tahun 1999) mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perkembangan jumlah BPR tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel - 6
Perkembangan Jumlah BPR Di Wilayah Kerja
Kantor Bank Indonesia Semarang
Tahun 1997 sd. 1999

No.	Jenis BPR	Tahun		
		1997	1998	1999
1.	BPR (Umum)	116 BPR	119 BPR	120 BPR
2.	BPR BKK	107 BPR BKK	107 BPR BKK	189 BPR BKK
	Jumlah	223 BPR	226 BPR	309 BPR

Sumber : Bank Indonesia, Semarang

Dalam periode 3 (tiga) tahun tersebut terdapat penambahan 4 BPR dan 82 BPR BKK yang tersebar di 17 Daerah Tingkat-II di Jawa Tengah. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 1998 terdapat penambahan 3 BPR atau 1,3% dan tidak terdapat penambahan jumlah BPR BKK. Sedangkan pada tahun 1999 terjadi penambahan 83 BPR atau 36,7% yang terdiri dari 1 BPR dan 82 BPR BKK.

Relatif sedikitnya penambahan jumlah BPR (tidak termasuk BPR BKK) disebabkan cukup selektipnya pertimbangan pemilik untuk mendirikan BPR baru baik karena pertimbangan teknis maupun pertimbangan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Sebelum suatu BPR baru didirikan, calon pemilik diwajibkan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap rencana pendirian suatu BPR di suatu daerah tertentu yang merupakan persyaratan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.25/5/BPPP tanggal 26 Februari 1993 tentang Peraturan

Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut terdapat perubahan wewenang pemberian izin pendirian BPR dari Departemen Keuangan kepada Bank Indonesia. Sesuai dengan Bab-II Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, prosedur pendirian BPR yang dirinci pada pasal 3 sampai dengan pasal 12 menyebutkan bahwa BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya dengan izin Direksi Bank Indonesia. Pada saat mendirikan BPR, pemilik wajib melakukan salah satu persyaratan diantara beberapa persyaratan lain yang ditentukan yakni menyusun rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat ; *pertama*, hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, *kedua*, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud, *ketiga* rencana kebutuhan pegawai dan *keempat*, proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPR melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi. Dengan adanya ketentuan tersebut disertai dengan semakin padatnya jumlah BPR disatu wilayah menyebabkan pemilik melakukan pertimbangan yang matang untuk mendirikan BPR baru bila dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan untuk mengalihkan bentuk BKK menjadi BPR BKK.

Peningkatan jumlah BPR BKK yang cukup pesat tersebut tidak terlepas dari kebijakan dari pemilik (Pemda Tingkat-I, Pemda Tingkat-II Jawa Tengah dan BPD. Jawa Tengah) untuk mengembangkan perekonomian di daerah tingkat-II di seluruh

Jawa Tengah dengan cara meningkatkan status Badan Kredit Kecamatan (BKK) menjadi BPR. Peningkatan status tersebut dilakukan sejak tahun 1991 untuk mengantisipasi kebijakan Pakto 1988. Pada tahun 1997 dan 1998 tidak terdapat penambahan jumlah BPR BKK sedangkan pada tahun 1999 terjadi peningkatan jumlah BPR BKK sebanyak 87 BPR BKK yang merupakan pengukuhan BKK menjadi BPR BKK. Jumlah pengukuhan BKK menjadi BPR BKK pada tahun 1999 sebanyak 148 buah dan 87 BPR BKK diantaranya berada di wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang. Adapun struktur kepemilikan BPR BKK sebagian besar atau 50% dimiliki oleh Pemda Tingkat-I Jawa Tengah, 35% merupakan saham BPD Jawa Tengah serta 15% merupakan saham dari Pemda Tingkat-II Jawa Tengah.

4.3. Gambaran Umum Kegiatan Usaha BPR Sampel

4.3.1. Perkembangan usaha BPR.

Perkembangan usaha BPR di Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Semarang, dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel - 7
Perkembangan Usaha BPR Di Wilayah Kerja
Kantor Bank Indonesia Semarang
Tahun 1997 - 1999

(Dalam Ribuan Rp.)

No.	Kegiatan usaha BPR	Tahun		
		1997	1998	1999
1.	Total Aktiva	246.423.373	248.525.359	392.216.416
2.	Kredit yang diberikan	206.389.503	181.180.174	295.383.613
3.	Dana pihak ketiga			
	• Tabungan	69.596.219	70.915.733	133.742.665
	• Deposito	73.252.882	67.185.247	116.593.858
	Jumlah	142.849.101	138.100.494	250.336.523
4.	• Laba Tahun berjalan	8.692.693	6.331.237	14.437.623
	• Rata-rata per BPR	38.981	28.014	46.724

Sumber : Bank Indonesia, Semarang

Berdasarkan data tersebut di atas, perkembangan kinerja BPR selama 3 (tiga) tahun terakhir relatif stabil walaupun terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kondisi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya jumlah total aktiva BPR sedangkan sisi laba tahun berjalan sedikit mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat dipertahankan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam melakukan langkah antisipasi bagi pemulihan kepercayaan

masyarakat melalui program penjaminan pemerintah dan mengaktifkan peran Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Jawa Tengah.

Program penjaminan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan tatacara penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, program penjaminan pemerintah adalah jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR yang terbatas kepada simpanan pihak ketiga bukan bank, berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pihak yang dijamin dalam program penjaminan adalah nasabah penyimpan dana pada BPR yang meliputi nasabah perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan serta lembaga bukan bank. Dengan adanya program penjaminan tersebut penurunan dana yang terjadi pada tahun 1998 kembali meningkat disamping itu mulai membaiknya perekonomian nasional.

Pembinaan BPR melalui Perbarindo merupakan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perbaikan tekhnis operasional BPR terutama pembinaan sumberdaya manusia BPR. Melihat pentingnya posisi Perbarindo, Bank Indonesia memberikan pembinaan terhadap perbarindo dengan cara memberikan bantuan tehnis yang untuk selanjutnya dikembangkan dan diteruskan kepada anggotanya sehingga diharapkan terjadi perbaikan kinerja BPR dimasa yang akan datang.

a. Perkembangan Total Aktiva.

Total aktiva BPR pada tahun 1998 meningkat sebesar Rp2.101.986 ribu atau 0,85% bila dibandingkan dengan posisi total aktiva BPR pada tahun 1997 sebesar Rp246.423.373 ribu. Peningkatan yang relatif kecil tersebut berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Namun demikian total aktiva bank tidak mengalami perubahan yang drastis karena adanya Program Penjaminan yang dilakukan pemerintah terhadap dana masyarakat yang disimpan di BPR. Krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan *cost of fund* menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan bank mengalami *positive spread* yang sangat tipis namun demikian tidak mengganggu aktivitas proses intermediasi BPR. Disamping itu, dengan adanya dampak kenaikan harga karena kebijakan penetapan suku bunga tinggi menyebabkan kualitas kredit yang diberikan mengalami penurunan kualitas kearah yang lebih buruk karena kegagalan debitur untuk melakukan kewajibannya berupa pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman sehingga laba BPR secara umum mengalami penurunan. Dengan berhasilnya pemerintah untuk menstabilkan suku bunga, pada tahun 1999 total aktiva BPR meningkat sebesar Rp143.691.057 ribu 57,82% bila dibandingkan dengan posisi total aktiva BPR pada tahun 1998 sebesar Rp. 248.525.359 ribu. Pada posisi tahun tersebut BPR telah kembali melakukan ekspansi kredit sehingga proses intermediasi di lingkup BPR mulai pulih kembali disamping itu terdapat pula penambahan 1 BPR dan 82 BPR BKK di wilayah Kantor Bank Indonesia Semarang. Dengan adanya penambahan jumlah BPR BKK berdampak semakin bertambahnya sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil di wilayah pedesaan.

b. Perkembangan Kredit yang diberikan.

Perkembangan kredit yang diberikan BPR pada tahun 1998 menurun sebesar Rp25.209.329 ribu atau 12,21% bila dibandingkan dengan posisi kredit yang diberikan pada tahun 1997 sebesar Rp206.389.503 ribu. Penurunan tersebut berkaitan erat dengan masa krisis ekonomi, pada tahun tersebut suku bunga kredit sangat tinggi mengikuti tingginya suku bunga simpanan yang dijamin oleh pemerintah. Dalam kondisi demikian strategi yang ditempuh BPR adalah melakukan penghentian pemberian kredit atau pemberian kredit dengan cara sangat selektif. Sebagian besar BPR hanya melakukan perpanjangan kredit yang dianggap layak untuk membiayai perdagangan di pos-pos pelayanan dilingkungan BPR, sedangkan pemohon kredit baru yang mengandung resiko untuk sementara dihentikan untuk menghindari meningkatnya jumlah kredit bermasalah. Sebagai alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan dari dana masyarakat yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit, BPR menempatkan dana tersebut di bank umum maupun BPR lainnya dalam bentuk deposito. Seiring dengan mulai pulihnya krisis ekonomi yang ditandai semakin stabilnya suku bunga maka pada tahun 1999, total kredit yang diberikan BPR meningkat sebesar Rp114.203.439 ribu atau 63,03% bila dibandingkan dengan posisi total aktiva pada tahun 1998 sebesar Rp. 181.180.174 ribu. Peningkatan jumlah kredit yang diberikan pada tahun 1999 tersebut berkaitan erat dengan penambahan 1 BPR dan 82 BPR BKK dan umumnya pemberian kredit diberikan untuk sektor perdagangan untuk membiayai usaha kecil di pedesaan.

Walaupun secara umum pemberian kredit mengalami peningkatan, namun tidak disertai dengan perbaikan kualitas pemberian kredit. Hal ini disebabkan

lemahnya analisis kredit yang dimiliki BPR. Penurunan kualitas kredit dapat berdampak langsung kepada menurunnya modal bank, dan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada bank. Untuk mengatasi hal tersebut secara bertahap dan berkesinambungan telah diberikan bantuan teknis kepada analisis kredit BPR berupa penyuluhan, pendidikan singkat maupun studi banding ke daerah lain yang didanai oleh Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan Perbarindo Jawa Tengah. Dengan terbentuknya tenaga terdidik yang handal dibidang perkreditan kualitas kredit dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga akan memperbaiki kondisi keuangan BPR dalam jangka panjang.

c. Perkembangan dana pihak ketiga.

Perkembangan dana pihak ketiga BPR yang terdiri dari tabungan dan deposito pada tahun 1998 menurun sebesar Rp.4.748.607 ribu atau 3,32% bila dibandingkan dengan posisi dana pihak ketiga BPR pada tahun 1997 sebesar Rp142.849.101 ribu. Penurunan tersebut berkaitan dengan krisis ekonomi yang dampaknya melanda ke wilayah pedesaan sehingga kebutuhan masyarakat semakin tinggi karena melambungnya berbagai harga kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, kondisi tersebut tercermin dari pengalihan simpanan masyarakat dari deposito ke tabungan. Pada posisi tersebut deposito mengalami penurunan sebesar Rp.6.067.635 ribu atau 8,28%, sementara itu tabungan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.319.514 ribu atau 1,90%. Pada kondisi tersebut, fasilitas tabungan lebih menarik bila dibandingkan dengan deposito antara lain disebabkan suku bunga lebih tinggi dan mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu. Sedangkan apabila pemilik deposito ingin mencairkan

dananya maka akan dikenakan denda yang merugikan deposan. Pada tahun 1999, dengan semakin stabilnya suku bunga dan adanya program penjaminan pemerintah, simpanan pihak ketiga BPR meningkat sebesar Rp112.236.029 ribu atau 81,27% bila dibandingkan dengan posisi total aktiva pada tahun 1998 sebesar Rp. 138.100.494 ribu. Pada posisi tersebut, tabungan mengalami peningkatan sebesar Rp.62.826.932 ribu atau 88,59% sedangkan deposito mengalami peningkatan sebesar Rp.49.408.611 ribu atau 73,54%. Peningkatan dana pihak ketiga tersebut berkaitan dengan beragamnya jenis tabungan khas dari masing-masing BPR disertai dengan suku bunga yang menarik disertai dengan undian yang ditarik secara periodik. Mobilisasi dana oleh BPR dilakukan dengan cara mendirikan pos-pos pelayanan di beberapa pasar. Petugas BPR yang telah ditentukan melakukan tugas penggalan dana disertai dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit sekaligus melakukan penagihan. Pelayanan yang demikian sangat mendukung keberhasilan operasional BPR namun demikian keberhasilan tersebut harus didukung dengan pencatatan yang baik dan sempurna karena penabung dan debitur kredit BPR umumnya sangat banyak jumlahnya dan nominal dana yang dilayani sangat kecil.

d. Perkembangan laba tahun berjalan,

Perkembangan laba tahun berjalan BPR pada tahun 1998 menurun sebesar Rp2.361.456 ribu atau 27,17% bila dibandingkan dengan posisi laba tahun berjalan pada tahun 1997 sebesar Rp8.692.693 ribu. Penurunan tersebut merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Walaupun secara umum tidak terjadi *negative spread*, kondisi ekonomi yang memburuk

berpengaruh langsung terhadap kualitas kredit yang diberikan baik disebabkan karena terganggunya *cash flow* debitur yang memanfaatkan fasilitas pinjaman di sektor perdagangan, disamping itu terjadi pula gangguan alam bagi petani yang memanfaatkan fasilitas pinjaman kepada sektor pertanian. Secara rata-rata laba tahun berjalan pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar Rp.10.967 ribu atau 28,13%. Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, laba tahun berjalan BPR pada tahun 1999 meningkat sebesar Rp8.106.386 ribu atau 128,04% bila dibandingkan dengan posisi laba berjalan pada tahun 1998 sebesar Rp6.331.237 ribu. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan kondisi permintaan dalam negeri yang mulai membaik. Dengan adanya perbaikan dari kondisi krisis harga hasil pertanian diluar padi yang berasal dari pedesaan mengalami peningkatan sehingga terjadi pertambahan omset penjualan. Peningkatan pendapatan petani dan pedagang perantara yang menikmati fasilitas kredit akan meningkatkan pula pendapatan operasional BPR.

4.3.2. Penyebaran dan Perkembangan BPR.

Daerah operasional BPR di Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Semarang tersebar di 17 Daerah Tingkat-II di Jawa Tengah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pendirian BPR didasarkan kepada modal disetor. Pada umumnya pendirian BPR berada pada propinsi tertentu. Penyebaran kantor hanya dapat dilakukan pada wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya, dan pendirian BPR maupun pembukaan kantor cabang maupun pos pelayanan harus mendapat izin tertulis dari Direksi Bank Indonesia. Rencana pendirian kantor BPR dimaksud dilakukan dengan cara mengajukan permohonan disertai dengan analisis yang mendalam terhadap peluang pasar dan potensi ekonomi daerah setempat. Potensi daerah tersebut

tercermin dari rencana kegiatan usaha bank dimaksud mencakup penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud.

Penyebaran dan perkembangan BPR di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel - 8
Perkembangan BPR Menurut Dati-II Di Wilayah Kerja
Kantor Bank Indonesia Semarang
Tahun 1997 sd. 1999

No	Daerah Tingkat-II Jawa Tengah	Tahun 1997		Tahun 1998		Tahun 1999	
		BPR	BPR BKK	BPR	BPR BKK	BPR	BPR BKK
1.	Kodia Semarang	3	3	3	3	3	9
2.	Kab. Semarang	18	6	18	6	18	9
3.	Kabupaten Grobogan	7	9	7	9	7	18
4.	Kabupaten Demak	10	7	10	7	10	9
5.	Kabupaten Kendal	19	9	20	9	21	13
6.	Kodia Salatiga	2	0	2	0	2	0
7.	Kabupaten Pati	9	11	10	11	10	20
8.	Kabupaten Kudus	5	8	5	8	5	9
9.	Kabupaten Rembang	3	10	3	10	3	11
10.	Kabupaten Blora	4	10	4	10	4	14
11.	Kabupaten Jepara	4	7	4	7	4	10
12.	Kodia Magelang	14	0	14	0	14	2
13.	Kabupaten Megelang	1	3	1	3	1	11
14.	Kab. Temanggung	6	7	6	7	6	10
15.	Kab. Wonosobo	4	2	4	2	4	9
16.	Kab. Kebumen	5	11	5	11	5	20
17.	Kab. Purworejo	2	4	3	4	3	15
	Jumlah	116	107	119	107	120	189

Sumber : Bank Indonesia, Semarang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tingkat kepadatan BPR terdapat di Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan Kabupaten lainnya penyebaran BPR cukup merata yang sebagian besar merupakan penyebaran BPR BKK. Penyebaran BPR di wilayah Kantor Bank Indonesia Semarang berkaitan pula dengan pertumbuhan pendapatan masing-masing daerah.

4.3.3. Bentuk dan status kepemilikan BPR.

Bentuk BPR di Wilayah Kerja Bank Indonesia Semarang sebagian besar berbentuk BPR konvensional dan sebagian kecil berbentuk syariah. Pada tahun 1999 terdapat 307 BPR konvensional sedangkan 2 berbentuk BPR Syariah (BPRS). Dengan diberlakukannya UU.No.10 Tahun 1998 di Jawa Tengah telah berkembang BPR syariah yang mendasarkan operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Produk-produk yang ditawarkan berlainan dengan produk BPR konvensional yang berbasis bunga sedangkan produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah berdasarkan kepada bagi hasil dan kesepakatan lainnya.

Status kepemilikan BPR di Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia digolongkan kepada 3 (tiga) kepemilikan yakni ; Perusahaan Terbatas (PT) , Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi. BPR dengan kepemilikan PT sebagian besar merupakan BPR yang didirikan setelah Pakto 1988 baik BPR konvensional maupun BPR Syariah. Sedangkan BPR dengan bentuk PD dan Koperasi merupakan kepemilikan dari Pemda Jawa Tengah baik Tingkat-I maupun Tingkat-II tercermin dari berdirinya 189 BPR BKK. Sejalan dengan hal itu, terdapat pula BPR yang dimiliki oleh Pemda Tingkat-II dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD).

4.3.4. Kegiatan operasional BPR.

Sesuai dengan ketentuan BPR yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, kegiatan operasional BPR tidak lagi dibatasi oleh wilayah kecamatan akan tetapi diperluas sampai dengan Wilayah Propinsi. Bahkan apabila ingin memperluas jaringan ke Propinsi lain maka BPR yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan modalnya menjadi Rp. 1 miliar. Dengan adanya ketentuan tersebut, perluasan daerah operasional BPR semakin luas akan mempengaruhi kinerja BPR terutama dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan operasional BPR umumnya dilakukan dengan cara mendirikan pos-pos pelayanan di berbagai pasar tradisional yang berdekatan dengan lokasi BPR dan apabila terdapat potensi yang menguntungkan dapat mendirikan pos pelayanan didaerah yang cukup jauh dengan lokasi BPR.

Secara umum BPR tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam mengumpulkan dana pihak ketiga baik dalam bentuk deposito maupun dalam bentuk tabungan. BPR secara apresiatip terus melakukan pengembangan produk tabungan khas yang dimiliki oleh masing-masing BPR disertai dengan hadiah yang cukup menarik. Dengan cara demikian bank mengalami peluang untuk melemparkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun menanamkannya dalam bentuk deposito di bank umum maupun dalam BPR lainnya. Strategi untuk menanamkan dana yang umumnya menjadi kendala bagi BPR, apabila penyaluran dana dalam bentuk kredit mengalami kegagalan maka pendapatan BPR akan mengalami

gangguan dan selanjutnya kinerja BPR secara akumulatif akan cenderung akan mengalami penurunan bila diukur dengan ukuran CAMEL.

Sumber utama penerimaan BPR bila ditinjau dari komponen laba rugi bank terpusat pada pendapatan bunga baik dari pendapatan bunga bank maupun pendapatan bunga dari pihak ketiga bukan bank. Hal tersebut merupakan ciri khas dari BPR yang berorientasi kepada *Interest Based* karena keterbatasan usahanya dibandingkan dengan bank umum yang berorientasi kepada *Fee Based*. Disamping itu jenis pendapatan operasional lainnya terdiri dari provisi dan komisi serta lainnya. Sumbangan pendapatan operasional dari bunga kredit dan bunga penempatan sangat menentukan bagi peningkatan kinerja BPR. Apabila pemberian kredit menurun kualitasnya karena berbagai sebab maka pendapatan bunga akan semakin kecil dan mempengaruhi perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Semakin besar kredit yang memiliki kolektibilitas buruk semakin besar pula penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD), dan apabila perhitungan ini tidak mencukupi bila dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang ada (PPAP) maka kekurangan tersebut akan mengurangi perhitungan modal bank. Menurunnya modal bank akan memperkecil pula kesempatan bank untuk melakukan penyaluran kredit baru. Agar permasalahan potensial tersebut tidak terjadi maka unsur efisiensi menjadi faktor yang menentukan dalam upaya mempertahankan kinerja BPR.

Efisiensi BPR dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap peningkatan beban operasional BPR baik beban operasional yang bersumber dari beban bunga maupun dari beban lainnya seperti : premi asuransi, tenaga kerja, sewa, pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan maupun barang dan jasa lainnya.

Pengelolaan pengeluaran BPR sangat penting sehingga diharapkan dapat terbentuk pendapatan operasional BPR. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Surat Keputusan Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR menyebutkan bahwa bagian modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Hal tersebut mengisyaratkan agar BPR lebih mengutamakan untuk pembiayaan operasional BPR bila dibandingkan dengan pendirian gedung yang tidak berkaitan langsung dengan operasional BPR, sedangkan untuk BPR yang telah berjalan hal tersebut tidak di atur. Apabila BPR ingin melakukan investasi dalam Harta Tetap dan Inventaris atau melakukan penambahan pegawai akan meningkatkan beban yang berpengaruh langsung terhadap ukuran efisiensi yang dipergunakan yakni : ratio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.

4.4. Gambaran Umum BPR Bermasalah Struktural.

Secara umum kegiatan operasi BPR adalah menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kedalam kredit atau penanaman pada bank/BPR lainnya. Dalam mengatur kegiatan operasinya, BPR dibatasi oleh berbagai ketentuan dari Bank Indonesia maupun instansi lain seperti Perpajakan, Pemerintah Daerah setempat dan sebagainya.

Alat ukur kinerja BPR adalah CAMEL yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SE No. 30/3/UPPB dan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR masing-masing tanggal 30 April 1997. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa alat ukur kinerja BPR dipengaruhi beberapa faktor yang masing-masing memiliki bobot tersendiri, yaitu permodalan yang memiliki bobot 20%, kualitas aktiva produktif yang

memiliki bobot 30%, manajemen yang memiliki bobot 20%, rentabilitas yang memiliki bobot 10% dan likuiditas yang memiliki bobot 10%. Masing-masing faktor tersebut diukur secara kuantitatif dengan menggunakan berbagai rasio, yaitu rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (CAR), rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk bank terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk, rasio laba terhadap total asset (ROA), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), rasio alat likuid terhadap hutang (*Cash Ratio*) dan rasio kredit terhadap dana yang diterima (LDR). Sedangkan untuk mengukur faktor manajemen digunakan kuesioner yang berisi 25 pertanyaan yang mencakup manajemen umum dan manajemen resiko.

Hasil akhir dari penilaian beberapa faktor tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan jumlah nilai kredit tersebut penilaian kinerja BPR digolongkan menjadi empat kriteria, yaitu Sehat apabila memiliki nilai kredit 81 sampai dengan 100, Cukup Sehat apabila memiliki nilai kredit 66 sampai dengan 81, Kurang Sehat apabila memiliki nilai kredit 51 sampai dengan 66 dan Tidak Sehat apabila memiliki nilai kredit 0 sampai dengan 51.

Suatu BPR dapat dikatakan sebagai BPR bermasalah struktural apabila memenuhi sekaligus empat kriteria sebagai berikut : ***tingkat kesehatan menjadi tidak sehat (TS) selama 18 bulan berturut turut, kualitas aktiva produktif tergolong tidak sehat (TS), BPR telah menderita kerugian sehingga modal atau rasio CAR negatif, Likuiditas bank tidak sehat (TS).***

Permasalahan yang timbul pada BPR bermasalah struktural antara lain disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Modal bank menurut perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM) tidak mencapai 8% dari ATMR sehingga CAR bank buruk.
2. Aktiva produktif bank semakin memburuk yang ditandai dengan meningkatnya rasio KAP. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya kredit bermasalah yang tidak mampu ditangani oleh pengurus bank. Adapun penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat dibedakan dari faktor intern maupun ekstern. Dari sisi faktor intern dapat disebabkan karena lemahnya pengawasan atau pembinaan bank terhadap debitur dan kurangnya pemenuhan persyaratan-persyaratan kredit yang menyebabkan sebagian pemberian kredit tidak didukung dengan analisa kemampuan pengembalian kredit dan hanya menilai barang jaminan. Sedangkan dari faktor ekstern dapat disebabkan karena ketidakmampuan debitur dalam pengembalian kredit yang disebabkan kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan dan karena debitur berpindah tempat/alamat tanpa pemberitahuan kepada bank. Kondisi tersebut juga didukung oleh ketidakmampuan pihak bank dalam penanganan terhadap kredit bermasalah yang disebabkan karena adanya kepentingan pemilik/pegawai bank, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan menurunnya semangat kerja pegawai.
3. Kondisi rentabilitas yang semakin memburuk ditandai dengan peningkatan rugi usaha selama beberapa periode. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen sudah tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bank. Dengan semakin meningkatnya rugi usaha tersebut berarti semakin meningkat pula dana pihak ketiga yang digunakan manajemen untuk menutup biaya operasional bank.

4. Likuiditas bank semakin memburuk yang disebabkan penanganan kredit bermasalah tidak kunjung teratasi serta rugi usaha yang semakin besar sementara pemilik tidak mampu menambah modal disetor. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya atas penarikan dana oleh nasabah.

Tabel - 9
Perkembangan Jumlah BPR Bermasalah Struktural
Di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang
Tahun 1997 sd. 1999

No	Jenis BPR	1997	1998	1999
1	PT BPR (Swasta)	2	3	4
2	PD BPR BKK	42	43	49
3	Jumlah	44	46	53

Sumber : Bank Indonesia Semarang

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam periode tiga tahun perkembangan BPR bermasalah struktural semakin meningkat yaitu 4,54% pada tahun 1998 dan 15,22%. Peningkatan terjadi terutama pada BPR BKK, yaitu dari 44 pada tahun 1997 menjadi 43 atau 2,27% pada tahun 1998 dan pada tahun menjadi 49 atau 13,95% di tahun 1999.

Melihat perkembangan yang demikian Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah. Adapun hal-hal yang telah dilakukan antara lain adalah dengan pemeriksaan khusus dan dilanjutkan dengan penambahan modal. Akan tetapi meskipun hal tersebut telah

dilakukan, perkembangan kondisi kinerja BPR yang telah melakukan penambahan modal tidak mengalami perbaikan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan yang intensif.

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan adanya model sebagai alat pemantauan ini diharapkan pengawasan terhadap penyehatan BPR bermasalah struktural bisa dilakukan lebih intensif.

BAB V

ANALISIS DATA

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hasil dari pengolahan data yang diperoleh dengan bantuan program *SPSS versi 10.0* yang disertai dengan evaluasi statistik dan ekonominya dan bagaimana menginterpretasikan model yang diperoleh. Disamping itu akan dikemukakan pula berbagai pengaruh variabel bebas terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural untuk periode 2 tahun sebelum kebangkrutan dan 1 tahun sebelum kebangkrutan.

5.1. Informasi Data

Persamaan yang dihasilkan adalah untuk membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dan dengan sampel yang digunakan sebanyak 53 BPR bermasalah struktural yang terdiri dari 11 BPR bermasalah struktural yang mengalami tingkat kerugian diatas 75% dari modal dan 42 BPR bermasalah struktural yang tingkat kerugiannya tidak sampai 75% dari modal., maka model ekonomi yang umum dipakai dalam tesis ini adalah :

$$\text{STATUS} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \dots + \beta_n X_n$$

dimana :

STATUS = status BPR bermasalah struktural yang dikoding dengan :

- Nilai 1 untuk BPR bermasalah struktural yang tidak bangkrut
- Nilai 0 untuk BPR bermasalah struktural yang bangkrut

X_n = variabel independent, yang dibedakan menjadi :

1. Variabel Proxy CAMEL :

Equity = rasio total modal terhadap total asset

Ncapta = rasio modal dikurangi *non performing loan* terhadap total asset

Bad Loan = *non performing loan* terhadap total kredit

Loanta = rasio kredit lancar terhadap total asset

Insider = BMPK terhadap total kredit

Overhead = biaya *overhead* terhadap total pendapatan

Occupancy = biaya okupansi terhadap total asset rata-rata per tahun

ROA = laba bersih terhadap total asset per tahun

Uncollected = bunga actual terhadap total kredit

LPR = pendapatan provisi dan administrasi terhadap total kredit

ICR = biaya bunga terhadap total biaya

ROE = laba bersih terhadap modal

Large Time = Dana III kelompok deposito besar terhadap total asset

Core = Dana III kelompok deposito kecil terhadap total asset

2. Variabel Karakteristik :

Size = logaritma total asset

Konsentrasi = jumlah BPR dalam suatu lokasi terhadap total BPR

Owner = dummy 1 untuk BPR pemerintah, 0 untuk BPR milik swasta

Budaya = dummy 0 = pantai, 1 = agraris, 2 = kota

Market share = total kredit BPR yang diobservasi terhadap total kredit seluruh
BPR

Growth Nasabah = pertumbuhan jumlah nasabah baru

3. Variabel Kondisi Ekonomi Lokal :

Perkapita = pendapatan perkapita penduduk

Unemploy = tingkat pengangguran penduduk

GDP = PDRB

Umur BPR = dummy 1 untuk umur BPR = 5 tahun, dummy 0 untuk umur
BPR < 5 tahun

Dalam analisa model ekonomi tersebut digunakan Regresi Logistik dengan membagi data ke dalam 2 periode :

1. Setahun sebelum BPR bermasalah struktural dinyatakan bangkrut (tahun 2000)
2. Dua tahun sebelum BPR bermasalah struktural dinyatakan bangkrut (tahun 1999)

5.2. Hasil Persamaan Regresi Logistik

Dengan menggunakan *program SPSS versi 10.00*, maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut :

Tabel 5.1:
Koefisien Regrsi Logistik untuk variabel Proxy CAMEL

PERIODE VARIABEL	Dua tahun sebelum BPR bangkrut	Setahun sebelum BPR bangkrut
<i>Equity</i>	13,587	-33,905
<i>Ncapata</i>	6,013	38,704
<i>Bad Loan</i>	32,646	28,615
<i>Loanta</i>	22,996	-9,645
<i>Insider</i>	839,506	427,304
<i>Overhead</i>	9,561	-0,193
<i>Occupancy</i>	11,188	-77,312
<i>ROA</i>	20,585	7,503
<i>Uuncollected</i>	3,488	-8,424
<i>LPR</i>	284,191	75,579
<i>ICR</i>	21,794	-10,609
<i>ROE</i>	-1,529	0,929
<i>Large Time</i>	13,267	12,112
<i>Core</i>	-6,620	1,482
<i>Constant</i>	-46,083	6,249

Sumber : data olahan

Dari table 5.1 di atas dapat disusun bentuk persamaan regresi logistik secara matematik sebagai berikut:

Dua tahun sebelum BPR bermasalah struktural bangkrut

$$\begin{aligned} \text{Ln } \frac{p}{1-p} = & - 46,083 + 13,587 \text{ Equity} + 6,013 \text{ Ncapta} + 32,646 \text{ BadLoan} \\ & + 22,996 \text{ Loanta} + 839,506 \text{ Insider} + 9,561 \text{ Overhead} \\ & + 11,188 \text{ Occupany} + 20,585 \text{ ROA} + 3,488 \text{ Uncolected} \\ & + 284,191 \text{ LPR} + 21,794 \text{ ICR} - 1,529 \text{ ROE} + 13,267 \text{ LargeTime} \\ & - 6,620 \text{ Core} \end{aligned}$$

Satu tahun sebelum BPR bermasalah struktural bangkrut

$$\begin{aligned} \text{Ln } \frac{p}{1-p} = & 6,249 - 33,905 \text{ Equity} + 38,704 \text{ Ncapta} + 28,615 \text{ Bad Loan} \\ & - 9,645 \text{ Loanta} + 427,304 \text{ Insider} - 0,193 \text{ Overhead} \\ & - 77,312 \text{ Occupancy} + 7,503 \text{ ROA} - 8,424 \text{ Uncollected} \\ & + 75,579 \text{ LPR} - 10,609 \text{ ICR} + 0,929 \text{ ROE} + 12,112 \text{ Large Time} \\ & + 1,482 \text{ Core} \end{aligned}$$

Tabel 5.2
Koefisien Regresi Logistik untuk Variabel Karakteristik

PERIODE VARIABEL	Dua tahun sebelum BPR bangkrut	Setahun sebelum BPR bangkrut
<i>Size</i>	1,211	-0,157
Konsentrasi	0,660	-0,299
<i>Owner</i>	0,965	0,934
Budaya	0,400	0,214
<i>Market Share</i>	-0,058	-0,106
<i>Growth</i>	0,400	1,847
<i>Constant</i>	-6,343	1,566

Sumber : data olahan

Dari table 5.2 di atas dapat disusun bentuk persamaan logistik regresi yang secara matematik sebagai berikut:

Dua tahun sebelum BPR bermasalah struktural bangkrut

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = -6,343 + 1,211 \text{ Size} + 0,660 \text{ Konsentrasi} + 0,965 \text{ Owner} \\ + 0,400 \text{ Budaya} - 0,058 \text{ Market Share} + 0,400 \text{ Growth}$$

Satu tahun sebelum BPR bermasalah struktural bangkrut

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 0,566 - 0,157 \text{ Size} - 0,299 \text{ Konsentrasi} + 0,934 \text{ Owner} + \\ 0,214 \text{ Budaya} - 0,106 \text{ Market Share} + 1,847 \text{ Growth}$$

Tabel 5.3

Koefisien Regresi Logistik untuk Variabel Kondisi Ekonomi Lokal

VARIABEL	PERIODE	
	Dua tahun sebelum BPR bangkrut	Setahun sebelum BPR bangkrut
Perkapita	0	0
<i>Unemploy</i>	-0,143	0,217
<i>GDP</i>	-0,451	-0,454
Umur BPR	-8,116	-7,819
<i>Constant</i>	13,317	12,213

Sumber : data olahan

Dari table 5.3 di atas dapat disusun dalam bentuk persamaan logistik regresi sebagai berikut:

Dua tahun sebelum BPR bermasalah struktural bangkrut

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 13,317 - 0,143 \text{ Unemploy} - 0,451 \text{ GDP} - 8,116 \text{ Umur BPR}$$

Satu tahun sebelum BPR bermasalah struktural bangkrut

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 12,213 + 0,217 \text{ Unemploy} - 0,454 \text{ GDP} - 7,819 \text{ Umur BPR}$$

5.3. Uji Validitas

Sebelum hasil regresi logistik tersebut disimpulkan, perlu untuk diadakan uji validitas hasil regresi logistik. Jenis pengujian yang akan dilakukan yaitu :

1. Evaluasi Statistik
2. Evaluasi Ekonomi

5.3.1. Evaluasi Statistik

Hasil uji statistik terhadap model regresi logistik dapat dilihat pada beberapa uji sebagai berikut :

a. Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dapat dilihat dari *output Hosmer and Lemeshow Test*, dengan hipotesa untuk keenam persamaan sebagai berikut :

- 1) H_0 = Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.
- 2) H_1 = Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan nilai *Goodness of Fit Test* yang diukur dengan nilai *Chi Square* pada Uji *Hosmer and Lemeshow*, yaitu :

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Tabel 5.4
Tabel Hosmer – Lemeshow Test

JENIS PERSAMAAN	Dua tahun sebelum BPR bangkrut			Satu tahun sebelum BPR bangkrut		
	<i>Chi Square</i>	Df	Sig	<i>Chi Square</i>	df	Sig
Var. Proxy Camel	26,941	8	0,382	3,771	8	0,877
Var. Karakteristik	7,576	8	0,476	5,429	8	0,711
Var. Kondisi Ekonomi Lokal	3,795	8	0,875	5,089	8	0,748

Sumber : data olahan

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa ke 6 (enam) model regresi logistik menunjukkan bahwa angka probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti model tersebut layak dipakai untuk menganalisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

b. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Overall Model Fit dapat dilakukan dengan menggunakan *Nagelkerke R Square*. Uji ini menunjukkan kemampuan model dalam menerangkan variasi perubahan variabel tidak bebas. *Nagelkerke R²* nilainya berada $0 \leq \text{Nagelkerke } R^2 \leq 1$, makin tinggi nilai *Nagelkerke R²* maka semakin tinggi pula kemampuan model dalam menerangkan variasi perubahan variabel tidak bebasnya. Bila nilai *Nagelkerke R²* adalah satu berarti pencocokan sempurna, sedangkan jika nilai *Nagelkerke R²* adalah nol berarti tidak ada hubungan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas. Uji *Nagelkerke R²* merupakan modifikasi dari uji *Cox & Snell R²*, dengan rumus :

$$NR^2 = \frac{R^2}{R^2_{MAX}}$$

Dimana :

$$R^2 = 1 - \left(\frac{L(0)}{L(B)} \right)^{2/N}$$

$$R^2_{MAX} = 1 - [L(0)]^{2/N}$$

Dengan :

$L(0)$ = *likelihood* dari model dengan hanya memasukkan konstanta

$L(B)$ = *likelihood* dari model

N = jumlah sampel

Nilai *Nagelkerke* R^2 untuk keenam model regresi logistik dapat dilihat pada tabel 5.5

Tabel 5.5
Tabel *Nagelkerke R Squqre*

JENIS PERSAMAAN	Dua tahun sebelum BPR bangkrut		Satu tahun sebelum BPR bangkrut	
	<i>Cox & Snell</i> R^2	<i>Nagelkerke</i> R^2	<i>Cox & Snell</i> R^2	<i>Nagelkerke</i> R^2
Var. Proxy Camel	0,518	0,809	0,430	0,693
Var. Karakteristik	0,093	0,145	0,121	0,196
Var. Kondisi Ekonomi Lokal	0,158	0,248	0,155	0,250

Sumber : data olahan

Dari tabel 5.5 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dua tahun sebelum kebangkrutan

- a. Model Regresi Variabel *Proxy CAMEL*, R^2 adalah 0,809. Ini berarti variabel bebas dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan variabel tidak bebas selama periode penelitian sebesar 80,9 % sedangkan sisanya 19,1 % dipengaruhi oleh variabel di luar model.
- b. Model Regresi Variabel Karakteristik, R^2 adalah 0,145. Ini berarti variabel bebas dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan variabel tidak bebas selama periode penelitian sebesar 14,5 % sedangkan sisanya 85,5 % dipengaruhi oleh variabel di luar model.
- c. Model Regresi Variabel Kondisi Ekonomi Lokal, R^2 adalah 0,248. Ini berarti variabel bebas dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan variabel tidak bebas selama periode penelitian sebesar 24,8 % sedangkan sisanya 75,2 % dipengaruhi oleh variabel di luar model.

Satu tahun sebelum kebangkrutan

- a. Model Regresi Variabel *Proxy Camel*, R^2 adalah 0,693. Ini berarti variabel bebas dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan variabel tidak bebas selama periode penelitian sebesar 69,3 % sedangkan sisanya 30,7 % dipengaruhi oleh variabel di luar model.
- b. Model Regresi Variabel Karakteristik, R^2 adalah 0,196. Ini berarti variabel bebas dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan

variabel tidak bebas selama periode penelitian sebesar 19,6 % sedangkan sisanya 80,4 % dipengaruhi oleh variabel di luar model.

- c. Model Regresi Variabel Kondisi Ekonomi Lokal, R^2 adalah 0,250. Ini berarti variabel bebas dalam model tersebut dapat menerangkan perubahan variabel tidak bebas selama periode penelitian sebesar 25 % sedangkan sisanya 75 % dipengaruhi oleh variabel di luar model.

c. Menguji Koefisien Regresi Logistik

Uji - t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independent. Pengujian uji bertujuan untuk melihat apakah secara individual independent variabel memiliki pengaruh terhadap dependent variabel, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hipotesis yang dipakai adalah sebagai berikut :

- 1) H_0 = Koefisien regresi tidak signifikan
- 2) H_1 = Koefisien regresi signifikan

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitasnya, yaitu :

- 1) Jika Probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima
- 2) Jika Probabilitas $< 0,05$ H_0 ditolak

Tabel 5.6
Tabel Koefisien Regresi Logistik

JENIS PERSAMAAN	INDEPENDEN T VARIABEL	Dua tahun sebelum BPR bangkrut		Satu tahun sebelum BPR bangkrut	
		Sig	Kesimpulan	Sig	Kesimpulan
Var. Proxy CAMEL	<i>Equity</i>	0,420	Tdk Sig	0,054	Tdk Sig
	<i>Ncapta</i>	0,577	Tdk Sig	0,039	Sig
	<i>BadLoan</i>	0,029	Sig	0,042	Sig
	<i>Loanta</i>	0,024	Sig	0,289	Tdk Sig
	<i>Inseder</i>	0,039	Sig	0,933	Tdk Sig
	<i>Overhead</i>	0,445	Tdk Sig	0,738	Tdk Sig
	<i>Occupancy</i>	0,927	Tdk Sig	0,384	Tdk Sig
	<i>ROA</i>	0,039	Sig	0,536	Tdk Sig
	<i>Uncollected</i>	0,758	Tdk Sig	0,047	Sig
	<i>LPR</i>	0,189	Tdk Sig	0,290	Tdk Sig
	<i>ICR</i>	0,160	Tdk Sig	0,268	Tdk Sig
	<i>ROE</i>	0,249	Tdk Sig	0,513	Tdk Sig
	<i>Large Time</i>	0,217	Tdk Sig	0,135	Tdk Sig
	<i>Core</i>	0,286	Tdk Sig	0,752	Tdk Sig
Var. Karakteristik	<i>Size</i>	0,103	Tdk Sig	0,575	Tdk Sig
	Konsentrasi	0,892	Tdk Sig	0,946	Tdk Sig
	<i>Owner</i>	0,224	Tdk Sig	0,270	Tdk Sig
	Budaya	0,658	Tdk Sig	0,831	Tdk Sig
	<i>Market Share</i>	0,222	Tdk Sig	0,601	Tdk Sig
	<i>Growth</i>	0,638	Tdk Sig	0,170	Tdk Sig
Var. Kondisi Ekonomi Lokal	Perkapita	0,290	Tdk Sig	0,350	Tdk Sig
	<i>Unemploy</i>	0,613	Tdk Sig	0,232	Tdk Sig
	<i>GDP</i>	0,227	Tdk Sig	0,228	Tdk Sig
	Umur BPR	0,779	Tdk Sig	0,785	Tdk Sig

Sumber : data olahan

Dari tabel 5.6 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Dua tahun sebelum kebangkrutan

Variabel *Bad Loan*, *Loanta*, *Insider* dan *ROA* memiliki nilai yang signifikan secara statistik, dengan demikian variabel tersebut secara individual berpengaruh terhadap variabel bebas.

Satu tahun sebelum kebangkrutan

Variabel *Ncapta*, *Bad Loan* dan *Uncollected* memiliki nilai yang signifikan secara statistik, dengan demikian variabel tersebut secara individual berpengaruh terhadap variabel bebas.

d. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi maksimum *likelihood parameter* dari model dapat dilihat pada tabel 5.6 atau pada hasil output SPSS *Variable in the equation*. Dengan hanya memasukkan dependent variabel yang signifikan, persamaan regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut :

Dua tahun sebelum kebangkrutan

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = -46,101 + 32,663 \text{ Bad Loan} + 23,005 \text{ Loanta} + 20,593 \text{ ROA} + 839,883 \text{ Insider}$$

atau

$$\frac{p}{1-p} = e^{(-46,101 + 32,663 \text{ Bad Loan} + 23,005 \text{ Loanta} + 20,593 \text{ ROA} + 839,883 \text{ Insider})}$$

$$= e^{-46,101} \times e^{32,663 \times \text{Bad Loan}} \times e^{23,005 \times \text{Loanta}} \times e^{20,593 \times \text{ROA}} \times e^{839,883 \times \text{Insider}}$$

Variabel bebas *Bad Loan* signifikan pada probabilitas 0,29, variabel *Loanta* pada probabilitas 0,024, variabel *ROA* pada probabilitas 0,039 dan variabel *Insider* pada probabilitas 0,042. Dari persamaan regresi logistik di atas dapat dilihat hubungan antara log dari BPR mengalami kebangkrutan dengan variabel bebasnya sebagai berikut :

- Berhubungan positif dengan *Bad Loan*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan setiap kenaikan *Bad Loan* (%) akan meningkatkan probabilitas BPR untuk bangkrut dengan faktor ($e^{32,663}$).
- Berhubungan positif dengan *Loanta*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan setiap kenaikan *Loanta* (%) akan meningkatkan probabilitas BPR untuk bangkrut dengan faktor ($e^{23,005}$).

- Berhubungan positif dengan *ROA*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan setiap kenaikan *ROA* (%) akan meningkatkan probabilitas BPR untuk bangkrut dengan faktor ($e^{20,593}$).
- Berhubungan positif dengan *Insider*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan setiap kenaikan *Insider* (%) akan meningkatkan probabilitas BPR untuk bangkrut dengan factor ($e^{839,883}$).

Satu tahun sebelum kebangkrutan

$$\ln \frac{p}{1-p} = 6,248 - 33,903 \text{ Equity} + 38,702 \text{ Ncapta} + 28,616 \text{ Bad Loan} - 8,424 \text{ Uncollected}$$

atau

$$\begin{aligned} \frac{p}{1-p} &= e^{(6,248 - 33,903 \text{ Equity} + 38,702 \text{ Ncapta} + 28,616 \text{ Bad loan} - 8,424)} \\ &= e^{6,248} \times e^{-33,903 \times \text{Equity}} \times e^{38,702 \times \text{Ncapta}} \times e^{28,616 \times \text{Bad Loan}} \times e^{-8,424 \times \text{Uncollected}} \end{aligned}$$

Variabel bebas *Equity* signifikan pada probabilitas 0,54, variabel *Ncapta* pada probabilitas 0,039, variabel *Bad Loan* pada probabilitas 0,042 dan variabel *Uncollected* pada probabilitas 0,047. Dari

persamaan regresi logistik di atas dapat dilihat hubungan antara log dari BPR mengalami kebangkrutan dengan variabel bebasnya sebagai berikut :

- Berhubungan negatif dengan *Equity*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan, maka probabilitas BPR mengalami kebangkrutan akan meningkat dengan faktor ($e^{32,663}$) untuk setiap unit (%) penurunan *Equity*.
- Berhubungan positif dengan *Ncapta*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan, maka probabilitas BPR mengalami kebangkrutan akan meningkat dengan faktor ($e^{38,702}$) untuk setiap unit (%) kenaikan *Ncapta*.
- Berhubungan positif dengan *Bad Loan*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan, maka probabilitas BPR mengalami kebangkrutan akan meningkat dengan faktor ($e^{28,616}$) untuk setiap unit (%) kenaikan *Bad Loan*.
- Berhubungan negatif dengan *Uncollected*. Ini berarti jika variabel yang lain dianggap konstan, maka probabilitas BPR mengalami kebangkrutan akan meningkat dengan faktor ($e^{8,424}$) untuk setiap unit (%) penurunan *Uncollected*.

e. Kemampuan Model Dalam Meramal

Kemampuan model yang dihasilkan untuk meramalkan probabilitas kebangkrutan BPR dapat dilihat pada tabel berikut, masing-masing menurut kelompok variabel bebasnya dan untuk dua tahun sebelum kebangkrutan serta satu tahun sebelum kebangkrutan.

Dua Tahun Sebelum Kebangkrutan

a. Model Regresi Logistik Variabel *Proxy CAMEL*

Tabel 5.7
Tabel Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel *Proxy CAMEL*

<i>OBSERVED</i>		<i>PREDICTED</i>		
		Status		% Correct
		Bangkrut	Tdk Bangkrut	
Status	Bangkrut	10	1	90,9
	Tdk Bangkrut	0	42	100,0
<i>Overall percentage</i>				98,1

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 5.7, diketahui bahwa dari 11 BPR yang bangkrut, dengan menggunakan model berhasil diramalkan 10 BPR atau 90,9% sebagai BPR yang bangkrut dan dari 42 BPR yang tidak bangkrut, 100% berhasil diramalkan tidak

bangkrut. Secara umum, kemampuan regresi logistik dengan variabel *Proxy CAMEL* dalam meramalkan kebangkrutan BPR adalah sebesar 98,1% atau sudah dapat dianggap baik (*fit*).

b. Model Regresi Logistik Variabel Karakteristik

Tabel 5.8
Tabel Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Karakteristik

<i>OBSERVED</i>		<i>PREDICTED</i>		
		Status		% Correct
		Bangkrut	Tdk Bangkrut	
Status	Bangkrut	2	9	18,2
	Tdk Bangkrut	1	41	97,6
<i>Overall percentage</i>				81,1

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 5.8, diketahui bahwa dari 11 BPR yang bangkrut, dengan menggunakan model berhasil diramalkan 2 BPR atau 18% sebagai BPR yang bangkrut dan dari 42 BPR yang tidak bangkrut, berhasil diramalkan 41 BPR atau 97,6% sebagai BPR tidak bangkrut. Secara umum, kemampuan regresi logistik dengan variabel Karakteristik dalam

meramalkan kebangkrutan BPR adalah sebesar 81,1% atau sudah dapat dianggap baik (*fit*).

c. Model Regresi Logistik Variabel Kondisi Ekonomi Lokal

Tabel 5.9
Tabel Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Kondisi Ekonomi Lokal

<i>OBSERVED</i>		<i>PREDICTED</i>		
		Status		% <i>Correct</i>
		Bangkrut	Tdk Bangkrut	
Status	Bangkrut	0	11	0
	Tdk Bangkrut	0	42	100
<i>Overall percentage</i>				79,2

Sumber: data olahan

Berdasarkan tabel 5.9, diketahui bahwa dari 11 BPR yang bangkrut, dengan menggunakan model diramalkan bahwa 11 BPR tersebut tidak bangkrut dan dari 42 BPR yang tidak bangkrut, semuanya berhasil diramalkan tidak bangkrut atau 100%. Secara umum, kemampuan regresi logistik dengan variabel Kondisi Ekonomi Lokal dalam meramalkan kebangkrutan BPR adalah sebesar 79,2% atau sudah dapat dianggap baik (*fit*).

Satu Tahun Sebelum Kebangrutan

a. Model Regresi Logistik Variabel Proxy Camel

Tabel 5.10
Tabel Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Proxy CAMEL

OBSERVED		PREDICTED		
		Status		% Correct
		Bangkrut	Tdk Bangkrut	
Status	Bangkrut	7	3	70
	Tdk Bangkrut	2	41	95,3
Overall percentage				90,6

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 5.10, diketahui bahwa dari 10 BPR yang bangkrut, dengan menggunakan model berhasil diramalkan 7 BPR atau 70% sebagai BPR yang bangkrut dan dari 43 BPR yang tidak bangkrut, berhasil diramalkan 41 BPR tidak bangkrut atau 95,3%. Secara umum, kemampuan regresi logistik dengan variabel *Proxy CAMEL* dalam meramalkan kebangkrutan BPR adalah sebesar 90,6% atau sudah dapat dianggap baik (*fit*).

b. Model Regresi Logistik Variabel Karakteristik

Tabel 5.11
Tabel Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Karakteristik

OBSERVED		PREDICTED		
		Status		%Correct
		Bangkrut	Tdk Bangkrut	
Status	Bangkrut	1	9	10
	Tdk Bangkrut	1	42	97,7
<i>Overall percentage</i>				81,1

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 5.11, diketahui bahwa dari 10 BPR yang bangkrut, dengan menggunakan model berhasil diramalkan 1 BPR atau 10% sebagai BPR yang bangkrut dan dari 43 BPR yang tidak bangkrut, berhasil diramalkan 42 BPR tidak bangkrut atau 97,7%. Secara umum, kemampuan regresi logistik dengan variabel Karakteristik dalam meramalkan kebangkrutan BPR adalah sebesar 81,1% atau sudah dapat dianggap baik (*fit*).

c. Model Regresi Logistik Variabel Kondisi Ekonomi Lokal

Tabel 5.11
Tabel Kemampuan Model untuk Meramal dari Variabel Kondisi Ekonomi Lokal

OBSERVED		PREDICTED		
		Status		% Correct
		Bangkrut	Tdk Bangkrut	
Status	Bangkrut	0	10	0
	Tdk Bangkrut	0	43	100
Overall percentage				81,1

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 5.11, diketahui bahwa dari 10 BPR yang bangkrut, dengan menggunakan model diramalkan bahwa 10 BPR tersebut tidak bangkrut dan dari 43 BPR yang tidak bangkrut, semuanya berhasil diramalkan tidak bangkrut atau 100%. Secara umum, kemampuan regresi logistik dengan variabel Kondisi Ekonomi Lokal dalam meramalkan kebangkrutan BPR adalah sebesar 81,1% atau sudah dapat dianggap baik (*fit*).

5.3.2 Evaluasi Ekonomi

Evaluasi ekonomi ini menjelaskan tanda-tanda dari koefisien regresi logistik, sebagai berikut :

- 1) *Equity* merupakan rasio Total Modal terhadap Total Aset. Koefisien *Equity* yang **negatif** berarti semakin besar nilai *Equity*, maka semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Equity*, semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *equity* atau modal bank merupakan komponen utama dalam rangka mengembangkan usaha dan menampung resiko kemungkinan kerugian. Agar modal dapat berfungsi sebagaimana tersebut di atas, maka besarnya modal harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimal penyediaan modal sebesar 8% dari aktiva rata rata tertimbang.
- 2) *Ncapta* merupakan rasio Modal dikurangi *Non Performing Loan* terhadap Total Aset. Koefisien *Ncapta* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Ncapta*, maka semakin besar kemungkinan BPR tumbuh. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Ncapta*, semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan kredit merupakan sumber penerimaan bank yang sangat besar utamanya BPR, untuk itu bank harus menjaga performa kredit agar tetap sehat. Apabila performa kredit kurang sehat (*non performing loan*) maka keuntungan yang diharapkan bank menjadi sebaliknya.

- 3) *Bad loan* merupakan rasio kredit macet terhadap Total Aset. Koefisien *Bad loan* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Bad Loan*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasio nilai *Bad Loan* semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan semakin banyak kredit bank yang macet maka bank wajib membentuk cadangan, sehingga kinerja bank menjadi semakin buruk.
- 4) *Loanta* merupakan rasio Kredit Lancar terhadap Total Aset. Koefisien *Loanta* yang **negatif** berarti semakin besar nilai *Loanta*, maka semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Loanta*, semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Kebalikan dari kredit macet, maka *loanta* merupakan kredit lancar yang mana semakin banyak kredit lancar pada suatu bank maka kinerja bank akan semakin baik karena pendapatan bank berupa bunga akan semakin besar
- 5) *Insider* merupakan rasio BMPK terhadap Total Aset. Koefisien *Insider* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Insider*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Insider*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan pemberinan kredit pada fihak terkait (pemilik) menyebabkan mengalami resiko pengembalian kredit yang cukup besar karena pemberian kredit pada fihak terkait umumnya tidak dilakukan analisa yang mendalam.
- 6) *Overhead* merupakan rasio Biaya *Overhead* terhadap Total Pendapatan. Koefisien *Overhead* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Overhead*, maka semakin besar

kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Overhead*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *overhead* kaitannya dengan efisiensi, maka semakin banyak biaya *overhead* terhadap pendapatan suatu bank memperlihatkan bank tersebut tidak efisien.

- 7) *Occupancy* merupakan rasio Biaya Okupansi terhadap Total Aset Rata-rata pertahun. Koefisien *Occupancy* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Occupancy*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Occupancy*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *occupancy* merupakan biaya seperti sewa, asuransi, pemeliharaan gedung dan lain lain dimana semakin besar ini membebani bank dapat diartikan bahwa operasional bank tersebut tidak efisien.
- 8) *ROA* merupakan rasio Laba Bersih terhadap Total Aset Rata-rata per Tahun. Koefisien *ROA* yang **positif** berarti semakin besar nilai *ROA*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *ROA*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *ROA* merupakan cerminan profitabilitas, dengan membaiknya *ROA* maka keuntungan bank akan meningkat dan pada gilirannya akan memperbaiki kinerja bank demikian sebaliknya.
- 9) *Uncollected* merupakan rasio Bunga Accrual terhadap Total Kredit. Koefisien *Uncollected* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Uncollected*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya,

semakin kecil nilai *Uncollected*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *uncollected* merupakan kontingensi pendapatan bunga, sehingga semakin besar *uncollected* mencerminkan *non performing loan* bank tidak baik dan berdampak pada penurunan kinerja bank.

- 10) *LPR* merupakan rasio Pendapatan Provisi dan Administrasi terhadap Total Kredit. Koefisien *LPR* yang **positif** berarti semakin besar nilai *LPR*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *LPR*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *LPR* merupakan pendapatan tambahan dari pemberian kredit, maka semakin besar pendapat *LPR* maka keuntungan bank menjadi semakin besar
- 11) *ICR* merupakan rasio Biaya Bunga terhadap Total Biaya. Koefisien *ICR* yang **negatif** berarti semakin besar nilai *ICR*, maka semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *ICR*, semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *ICR* mencerminkan manajemen dana dari perusahaan, semakin tinggi *ICR* mencerminkan *spread* positif dalam operasional bank demikian sebaliknya.
- 12) *ROE* merupakan rasio Laba Bersih terhadap Modal. Koefisien *ROE* yang **positif** berarti semakin besar nilai *ROE*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *ROE*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *ROE* merupakan salah satu indikator profitabilitas yang terkait dengan modal,

semakin besar *ROE* mencerminkan besarnya keuntungan yang didapat bank yang pada gilirannya akan menambah jumlah modal bank tersebut, demikian sebaliknya.

- 13) *Large Time* merupakan rasio Dana III Terbesar terhadap Total Aset. Koefisien *Large Time* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Large Time*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Large Time*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *Large Time* berkaitan dengan resiko likuiditas, maka semakin besar *Large Time* semakin besar pula bank mengalami *mismatch* jangka pendek.
- 14) *Core* merupakan rasio Dana III Kecil terhadap Total Aset. Koefisien *Core* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Core*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Core*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *Core* juga berkaitan dengan resiko likuiditas, dengan menyebarnya dana III pada depositan yang kecil kecil, maka semakin kuat pula posisi likuiditas bank.
- 15) *Size* merupakan logaritma Total Aset. Koefisien *Size* yang **negatif** berarti semakin kecil nilai *Size*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Size*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *size* secara tidak langsung merupakan ukuran besarnya aset yang dimiliki oleh bank dan semakin besar aset bank diduga semakin baik kinerja bank, namun sinyalemen ini masih harus dibuktikan dulu dengan bukti bukti yang empiris.

- 16) **Konsentrasi** merupakan rasio Jumlah BPR Dalam Satu Lokasi terhadap Total BPR. Koefisien Konsentrasi yang **negatif** berarti semakin besar nilai Konsentrasi, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai Konsentrasi, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan konsentrasi merupakan gambaran tingkat kejenuhan dan persaingan bank, diduga tingkat kejenuhan yang tinggi dan persaingan yang ketat mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- 17) **Owner** merupakan status kepemilikan BPR, yaitu dummy 1 untuk BPR pemerintah dan 0 untuk BPR swasta. Koefisien **Owner** yang **positif** berarti bahwa jika BPR tersebut adalah milik pemerintah, maka kemungkinan bangkrut lebih kecil daripada jika BPR adalah milik swasta. Hal ini dikarenakan diduga pengaruh politis mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- 18) **Budaya** merupakan daerah tempat BPR berada, yaitu dummy 0 untuk daerah pantai, dummy 1 untuk daerah agraris dan dummy 2 untuk daerah kota. Koefisien Budaya yang **positif** berarti kemungkinan BPR bangkrut akan lebih kecil jika berada di daerah agraris dan di daerah kota daripada jika BPR tersebut berada di daerah pantai. Hal ini dikarenakan karakter suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- 19) **Market Share** merupakan rasio Total Kredit BPR yang diobservasi terhadap Total Kredit seluruh BPR. Koefisien **Market Share** yang **negatif** berarti semakin kecil nilai **Market Share** berarti semakin besar kemungkinan BPR untuk bangkrut. Demikian pula sebaliknya, jika nilai **Market Share** semakin besar maka

kemungkinan BPR bangkrut semakin kecil. Hal ini dikarenakan *market share* berkaitan dengan daya saing bank maka semakin kecil *market share*, semakin kecil pula daya saing di daerah tersebut.

- 20) **Growth Nasabah** merupakan tingkat pertumbuhan nasabah baru. Koefisien *Growth Nasabah* yang **positif** berarti semakin besar nilai *Growth Nasabah*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Growth Nasabah*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *growth* nasabah merupakan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat akan bank.
- 21) **Perkapita** merupakan pendapatan perkapita penduduk dimana BPR berada. Koefisien Perkapita ternyata adalah nol, ini berarti berapa pun nilai Perkapita daerah tersebut tidak berpengaruh terhadap kebangkrutan BPR.
- 22) **Unemploy** merupakan tingkat pengangguran penduduk dimana BPR berdiri. Koefisien Unemploy yang **positif** berarti semakin besar nilai *Unemploy*, maka semakin besar kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai *Unemploy*, semakin kecil kemungkinan BPR mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan *unemploy* mencerminkan produktivitas perekonomian daerah dan diduga semakin tinggi tingkat *employ* akan mempengaruhi kinerja bank.
- 23) **GDP** merupakan Pendapatan Domestik Regional Bruto dimana BPR berada. Koefisien GDP yang **negatif** berarti semakin kecil nilai GDP berarti semakin besar kemungkinan BPR untuk bangkrut. Demikian pula sebaliknya, jika nilai GDP

semakin besar maka kemungkinan BPR bangkrut semakin kecil. Hal ini dikarenakan GDP merupakan cerminan kondisi ekonomi daerah, semakin tinggi GDP diduga mempunyai pengaruh terhadap kinerja BPR.

- 24) **Umur BPR** merupakan masa berdirinya BPR, yaitu dummy 1 untuk umur BPR = 5 tahun dan 0 untuk umur BPR < 5 tahun. Koefisien Umur BPR yang **negatif** berarti kemungkinan BPR bangkrut akan lebih besar terjadi pada BPR yang berumur 5 tahun daripada BPR yang berumur kurang dari 5 tahun. Hal ini dikarenakan umur lebih dari 5 tahun kinerja BPR sudah lebih mapan.

5.4. Analisa Kualitatif

Kembali kepada hipotesa awal yang akan dibuktikan dalam tesis ini, yaitu :

- 1) H_1 = *Equity* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 2) H_2 = *Ncapta* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 3) H_3 = *Bad loan* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural.
- 4) H_4 = *Loanta* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah structural

- 5) H5 = *Insider* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 6) H6 = *Overhead* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural.
- 7) H7 = *Occupancy* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 8) H8 = *ROA* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 9) H9 = *Uncollected* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural.
- 10) H10 = *LPR* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 11) H11 = *ICR* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural
- 12) H12 = *ROE* mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural.
- 13) H13 = Karakteristik BPR mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan bank bermasalah struktural
- 14) H14 = Kondisi Ekonomi Lokal mempunyai pengaruh terhadap kebangkrutan bank bermasalah struktural.

Ternyata hanya variabel bebas dari kelompok *Proxy CAMEL* yang mempunyai hubungan signifikan terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural. Itu pun tidak seluruh variabel *Proxy CAMEL* yang berpengaruh terhadap kebangkrutan BPR bermasalah struktural tetapi hanya variabel *Bad Loan*, *Loanta*, *ROA* dan *Insider* pada periode satu tahun sebelum kebangkrutan dan variabel *Ncapta*, *Bad Loan* dan *Uncollected* pada periode dua tahun sebelum kebangkrutan. Dengan demikian hanya hipotesa H2, H3, H4, H5, H8 dan H9 yang dapat diterima, sedangkan hipotesa lainnya tidak dapat diterima.

Bahwa variabel lain yaitu kareteristik dan kondisi ekonomi lokal tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kebangkrutan BPR bermasalah structural. Hal ini memberikan gambaran bahwa penurunan kinerja BPR menjadi BPR bermasalah struktural hanya dipengaruhi oleh faktor faktor finansial sedangkan faktor faktor diluar finansial seperti kareteristik dan kondisi ekonomi lokal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BPR.

Selain dari pada itu, dalam menentukan jumlah variabel tidak bebas, kami menyadari beberapa keterbatasan seperti dalam menganalisa lebih jauh dari kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan krisis perbankan yaitu antara lain tingkat suku bunga, laju inflasi, perubahan nilai tukar dan sebagainya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan BPR bermasalah struktural. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa pengaruh rasio keuangan, karakteristik BPR bermasalah struktural dan ekonomi terhadap kebangkrutan sehingga akan diperoleh model peramalan yang cocok untuk BPR bermasalah structural.

Pada akhir penelitian ini akan disajikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan

Model regresi logistik yang dihasilkan mampu untuk meramalkan kebangkrutan BPR bermasalah struktural dengan probabilitas sebesar 98,1%. Hasil pengujian data dan hipotesa dengan menggunakan model regresi logistik menunjukkan bahwa:

- a) Pada 2 (dua) tahun pengamatan sebelum kebangkrutan, *proxy* CAMEL mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebangkrutan BPR bermasalah struktural sedangkan karakteristik dan kondisi ekonomi lokal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebangkrutan BPR bermasalah struktural. Adapun variabel kontrol dari *proxy* CAMEL yang signifikan adalah variabel *Bad Loan* (kredit macet), *Loanta* (*performing loan*), *Insider* (BMPK) dan *Uncollected* (bunga *accrual*)

- b) Pada 1 (satu) tahun pengamatan sebelum kebangkrutan, *proxy* CAMEL mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebangkrutan BPR bermasalah struktural sedangkan karakteristik dan kondisi ekonomi lokal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kebangkrutan BPR bermasalah struktural. Adapun variabel kontrol dari *proxy* CAMEL yang signifikan adalah variabel *Ncapta*, *Loanta* (*performing loan*), dan *Uncollected* (*bunga accrual*)
- c) Kemampuan model untuk meramal pada 1 (satu) tahun pengamatan sebelum kebangkrutan adalah :
- Kelompok variabel *proxy* CAMEL memiliki ketepatan 90,6%
 - Kelompok variabel karakteristik memiliki ketepatan 81,1%
 - Kelompok variabel ekonomi lokal memiliki ketepatan 81,1%
- d) Kemampuan model untuk meramal pada 2 (dua) tahun pengamatan sebelum kebangkrutan adalah :
- Kelompok variabel *proxy* CAMEL memiliki ketepatan 98,1%
 - Kelompok variabel karakteristik memiliki ketepatan 81,1%
 - Kelompok variabel ekonomi lokal memiliki ketepatan 79,2%

6.2. Saran

Dengan diperolehnya model peramalan kebangkrutan BPR bermasalah struktural diatas, kiranya dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a) Model ini dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bagi pengawasan Bank Indonesia terhadap bank khususnya BPR bermasalah struktural untuk menganalisa secara riil perubahan kinerja bank atau BPR bermasalah struktural
- b) Model ini dapat digunakan untuk meramal kinerja BPR bermasalah struktural (*early warning system*) pada pengawasan bank untuk kepentingan pemilik maupun publik

6.3. Keterbatasan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini kami menyadari beberapa keterbatasan yang antara lain dalam penelitian faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat disajikan adalah kondisi ekonomi lokal, padahal industri perbankan sebagai jasa intermediasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi nasional seperti tingkat bunga, inflasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mongid, 2000, *Accounting Data and Bank Future Failure: A Model for Indonesia, Seminar Nasional Akuntansi 3.*
- Akhyar Adnan M dan Eha Kurniasih, 2000, Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk Memprediksi kebangkrutan dengan Pendekatan Altman, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Altman, Edward, 1968, *Financial Ratio Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankrupt, The Journal of Financial Vol. XXIII.*
- Beaver, Williams, 1966 *Financial ratios as Prediction of Failure, Empirical Research in Accounting Selected Studies Supplement Vol 5, The Journal of Accounting Research.*
- Bank Indonesia, 2000, Peraturan Bank Indonesia No 2/11/PBI tanggal 15 Desember 2000, tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- Bank Indonesia, 2001, On Site Supervisory Presence: Salah Satu Wahana Peningkatan Efektivitas Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.
- Bank Indonesia 1997, Surat keputusan Direksin Bank Indonesia No 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR.
- Bank Indonesia, 1998, Memorandum Bank Indonesia No 31/2/SM/Rahasia tanggal 20 Oktober 1998 tentang BPR bermasalah structural.

- Catherine M Daily and Dan Dalton, 1994 *Bankruptcy and Corporate Governance; The Impact of Board Composition and Structure, Academy of Management Journal Vol 71.*
- Dani Surya Sinaga, 2001, Hubungan antara Pengurus Pemilik dengan Kebangkrutan Bank, Thesis MM Undip.
- D'Aveni RA, 1990, *Top Managerial Practice and Organization Bankruptcy Organization Science Vol 2.*
- Dambolena, Ismail Gdan Sarkis J.Khoury 1980 *Ratio Stability and Corporate Failure. The Journal of Financial.*
- David A Whidbee 1997, *Board Composite and Control Of Shareholder Voting Right in the Banking Industri, Financial Management Vol 26*
- Etty M Nasser dan Titik Aryati 2000 Model Analisis CAMEL untuk Memprediksi Finansial Distress pada Sektor Perbankan yang Go Publik, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Famma E and Jensen M 1983, *Separation of Ownership and Control Journal of Law and Economic vol 26*
- Farid Harianto dan Siswono Sudomo 1998 Perangkat dan Analisis investasi, PT Bursa Efek Jakarta, Jakarta, Edisi pertama
- Golberg G, Lawrence, Anoop Rai, 1980, *The Struktur Performance Relationship for European Banking, The Journal of Banking Finance*

- Harlan D. Platt, Marjorie, B Platt and Gunnar Pedersen, 1994, *Banruptcy Discriminant with Real Variables, The Journal of Business Finance and Accounting* vol 21.
- Hite, Peggy A 1998 *An Examination of Factors Influencing Financial Reporting Decision of Small Business Owner Manager, Behavior Research in Accounting* Vol 10
- Indra dan Dadang 1998, Memprediksi Kondisi Perbankan melalui Pendekatan Solvency secara Dinamis, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No 53/KMK017/1999 - 31/12/KEP/DIR/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitulasi Bank Umum.
- Lembaran Negara Republik Indonesia 1998, Undang Undang Nomer 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Undang Undang Nomer 23 tahun 1999, tentang Undang Undang Bank Indonesia.
- Maddala, GS, 1983, *Limited Dependent and Quality Variable in Econometrics, New Cambridge University Press.*
- Nancy Sri Julianti, 2000, Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Periode sebelum dan sesudah tahun 1997, Tesis Program MM Undip.
- Niehaus Gregory R, 1989, *Owner Structure and Inventory Method Choice, The Accounting Review* Vol LXIV.

- O'Conner, Melvion C. 1997, *On The Usefullness of Financial Rations to Investors in Common Stock, The Accounting Riview*
- Ohlson,James,1980, *Financial rations and The ProbalisticPrediction of Bankruptcy, The Journal of Accounting Research.*
- Payamta dan Mas'ud Machfoudz,1999, Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta, Kelola No20/VIII/1999.
- Pi Lynn an Timme SG.1992, *Corporate Control and Bank Efficiency, The Journal of Banking and Finance.*
- Sinkey, Joseph F, Jr 1975, *A Mulivariat Statistical Analysis of The Characteristic of Problem Banks, The Journal of Finance.*
- Thomson James 1991, *Prediction Bank Failure in the 1980's Economics Review, First Quarter 1991*
- Titik Aryati dan Hekinus Manao,2000 Ratio Keuangan Senagai Prediktor Bank Bermasalah Di Indeonesia, Seminar Nasional Akutansi 3
- Wimboh Santoso, 1999 *The Determinant of Problem Bank In Indonesia (An Empirical Study) Bank Indonesia Research Peper No 1/1999.*
- Wilopo, 2000, Prediksi Kebangkrutan Bank, Seminar Nasional Akuntansi 3

Zainuddin dan Jogiyanto Hartono, 1999 Mamfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba; Suatu Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.

PUSTAKA - INDI